

**PEMIKIRAN ABDULLAH AD-DUMAIJI TENTANG KONSEP
KEPEMIMPINAN KEPALA NEGARA DALAM PERSPEKTIF FIQH
SIYASAH DAN RELEVANSINYA DENGAN NEGARA INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

EDI WAHYUDI

NPM: 1421020170

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iiyah)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG

TAHUN AKADEMIK

1441 H/2019 M

**PEMIKIRAN ABDULLAH AD-DUMAIJI TENTANG KONSEP
KEPEMIMPINAN KEPALA NEGARA DALAM PERSPEKTIF FIQH
SIYASAH DAN RELEVANSINYA DENGAN NEGARA INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

EDI WAHYUDI

NPM: 1421020170

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Drs. Henry Iwansyah, M.A.

Pembimbing II : Dr. Jayusman, M.Ag.

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG

TAHUN AKADEMIK

1441 H/2019 M

ABSTRAK

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam hidup, manusia selalu berinteraksi dengan sesama serta dengan lingkungan. Manusia hidup berkelompok baik dalam kelompok besar maupun dalam kelompok kecil. Hidup dalam berkelompok tentulah tidak mudah. Untuk menciptakan kondisi kehidupan yang harmonis anggota kelompok haruslah saling menghormati dan menghargai. Keteraturan hidup perlu selalu dijaga. Hidup yang teratur adalah impian setiap insan. Menciptakan dan menjaga kehidupan yang harmonis adalah tugas manusia. Untuk mewujudkannya dibutuhkan sosok seorang panutan yang dapat di andalkan. Sosok itu dapat disebut dengan pemimpin. Dengan berjiwa pemimpin manusia akan dapat mengelola diri, kelompok dan lingkungan dengan baik. Berbicara mengenai masalah kepemimpinan, Abdullah Ad-Dumaiji memiliki pemikiran sendiri mengenai masalah tentang bagaimana seorang pemimpin yang ideal untuk umat atau masyarakat. Seperti syarat-syarat, kewajiban, serta tujuan seorang pemimpin.

Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah konsep kepemimpinan menurut Abdullah Ad-Dumaiji dalam perspektif fiqh siyasah, dan bagaimanakah jika pemikirannya tersebut direlevansikan dengan Negara Indonesia ?

Penelitian ini bersifat kepustakaan *Library research*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat didalam ruangan perpustakaan. Misalnya berupa buku-buku, Undang-undang, Al-Quran, Kitab Hadist dan Ensiklopedia. Dan data-data lainnya.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, konsep kepemimpinan negara menurut Abdullah Ad-Dumaiji mengacu pada aspek kemaslahatan dan kesejahteraan yang mana orang yang berhak menjadi kepala negara merupakan orang yang harus berintegritas tinggi, berilmu, adil, mampu, sehat badan baik secara jasmani maupun rohani. Disamping itu orang yang berhak memilihnya pun hanyalah dari kalangan cerdik pandai dari umat dan ulama, karna pada dasarnya orang yang berakal akan memilih orang yang berakal pula dan yang paling layak untuk memegang jabatan penting ini. Sehingga tidak diperlukan adanya kampanye, dan membuang-buang dana besar secara batil untuk meraup suara bagi calon pemimpin pengganti. Adapun relevansi antara kepemimpinan negara Indonesia dan pemikiran Abdullah Ad-Dumaiji yaitu mengenai syarat atau kriteria calon yang akan menduduki jabatan pemimpin. Dan hal yang tidak relevansi antara pemikiran Abdullah Ad-Dumaiji dan negara Indonesia adalah mengenai tatacara penyelenggaraan dalam sistem pemilihannya. Selain itu pemikiran Abdullah Ad-Dumaiji ini tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Hal ini dikarenakan pemikiran Abdullah Ad-Dumaiji didasarkan kepada Al-Quran dan Hadist.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarama Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Nama : EDI WAHYUDI
NPM : 1421020170
Jurusan : Siyasah Syar' iyyah
Fakultas : Syari'ah
**Judul Skripsi : PEMIKIRAN ABDULLAH AD-DUMALJI
TENTANG KONSEP KEPEMIMPINAN
KEPALA NEGARA DALAM PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH DAN RELEVANSINYA
DENGAN NEGARA INDONESIA**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Drs. Henry Iwansyah, M.A
NIP. 195812071987031003

Pembimbing II

Dr. Javusman, M. Ag.
NIP.197411062000031002

**Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasah**

Drs. Susiadi AS, M. Sos.I.
NIP. 195808171993031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**PEMIKIRAN ABDULLAH AD-DUMAIJI TENTANG KONSEP KEPEMIMPINAN KEPALA NEGARA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DAN RELEVANSINYA DENGAN NEGARA INDONESIA**”, disusun oleh Edi Wahyudi, NPM: 1421020170, Program Studi : Siyasaah syar'iiyyah. Telah diajukan dalam siding MunaQosah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. Pada Hari/Tanggal:

DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. Susiadi AS., M. Sos. I. (.....)

Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. (.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A. (.....)

Penguji II : Dr. Jayusman, M.Ag. (.....)

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Intan Lampung**

**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP.197009011997031002**

MOTTO

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹



¹Departemen Agama RI., *Al- Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2007), h. 87.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, skripsi sederhana ini saya persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tuaku yang sangat luar biasa, ayahanda Dasim, dan Ibunda Edah tercinta, yang senantiasa memberikan Do'a, pengorbanan, kasih sayang, semangat, motivasi, serta inspirasi kepadaku.
2. Adikku tersayang Rafli yang selalu memberikan motivasi.
3. Keluarga besar Bapak H. Jumsih (Alm.) dan Hj. Rukmini.



RIWAYAT HIDUP

Edi Wahyudi, lahir pada 22 Juli 1996 di Desa Pajar Bulan Kecamatan Waytenong, Kabupaten Lampung Barat. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara, yang merupakan buah cinta kasih dari pasangan Bapak Dasim dan Ibu Edah . Adapun riwayat pendidikan adalah sebagai berikut:

1. TK Al-Irsyad Darussalam Pajar Bulan (kecamatan Waytenong, kabupaten Lampung Barat) lulus pada tahun 2003.
2. SDN 2 Pajar Bulan (Kecamatan Waytenong, Kabupaten Lampung Barat) lulus pada tahun 2009.
3. SMPN 1 Waytenong (Kecamatan Waytenong, Kabupaten Lampung Barat) lulus pada tahun 2011.
4. SMKN 1 Waytenong (Kecamatan Waytenong, Kabupaten Lampung Barat) lulus pada tahun 2014.
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Jurusan Siyasah dari tahun 2014 sampai saat ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah yang tidak terkira dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan raahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat beserta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyata membumi.

Skripsi ini berjudul “PEMIKIRAN ABDULLAH AD-DUMAIJI TENTANG KONSEP KEPEMIMPINAN KEPALA NEGARA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DAN RELEVANSINYA DENGAN NEGARA INDONESIA”. Selesaiannya penulisan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, dan uluran tangan dari berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnya disampaikan ucapan terimakasih yang tulus dan do’a, mudah-mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ucapan terimakasih ini diberikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag., Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M. Ag., selaku Dekan Fakultas syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Drs. Susiadi AS., M. Sos. I., selaku kepala jurusan Siyasa yang telah membantu memperlancar jalannya skripsi saya.

4. Drs. Henry Iwansyah, M.A. Selaku pembimbing akademik I dan Dr. Jayusman, M.Ag. Selaku pembimbing akademik II.
5. Bapak dan Ibu dosen Staf Karyawan Fakultas Syari'ah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Bapak dan Ibu Staf Karyawan perpustakaan Fakultas Syaria'ah dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung.
7. Untuk Bapak, Emi, Adikku, Bah Aki, Ma Nini, Bah Eman, Mak Ibu, Uwa, bibi serta teteh dan kakak-kakak sepupu. Terimakasih atas dukungan dan Do'anya selama ini dan bantuan yang tak terkira baik yang bersifat materi maupun non materi.
8. Untuk teman-teman seperjuanganku Siyasa C angkatan 2014 dan teman lainnya di UIN Raden Intan Lampung.
9. Untuk sahabatku Alex, Peni, Nay, Ocit.
10. Untuk sahabat terbaikku Ririn Purwaningsih.

Skripsi ini disadari masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang dikuasai. Oleh karna itu diharapkan masukan dan kritik yang bersifat membangun untuk skripsi ini.

Akhirnya dengan iringan terimakasih do'a dipanjatkan kehadirat Allah SWT , semoga segala bantuan dan amal baik bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga

Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Bandar Lampung, Agustus 2018
Penulis

Edi Wahyudi
1421020170



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
F. Metode Penelitian.....	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kepemimpinan Dalam Fiqh Siyash.....	14
1. Definisi Kepemimpinan	14
2. Dasar Hukum Kepemimpinan.....	15
3. Ciri-ciri Pemimpin dalam Islam.....	19
4. Karakteristik atau Syarat Pemimpin Negara	22
5. Syarat-Syarat Memilih Pemimpin.....	27
6. Kewajiban Pemimpin	30
B. Kepemimpinan Kepala Negara di Indonesia.....	32

BAB III KONSEP KEPEMIMPINAN MENURUT ABDULLAH AD-DUMAIJI

A. Biografi Abdullah Ad-Dumaiji	45
B. Karya-Karya Abdullah Ad-Dumaiji.....	46
C. Pemikiran Abdullah Ad-Dumaiji Tentang Kepemimpinan	49
1. Kewajiban Mengangkat Imam	49
2. Tujuan-Tujuan Imam	53
3. Metode Pengangkatan Imam.....	62
4. Syarat-Syarat Menjadi Imam	63

BAB IV ANALISIS

A. Konsep Kepemimpinan Kepala Negara Menurut Abdullah Ad-Dumaiji.....	76
---	----

B. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Konsep Kepemimpinan Kepala Negara Menurut Abdullah Ad-Dumaiji dan Relevansinya Dengan Negara Indonesia.....	78
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA	86
-----------------------------	-----------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis memasuki pembahasan mengenai skripsi ini dan sebagai langkah awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai “PEMIKIRAN ABDULLAH AD-DUMAIJI TENTANG KONSEP KEPEMIMPINAN KEPALA NEGARA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DAN RELEVANSINYA DENGAN NEGARA INDONESIA”, dan untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka secara ringkas penulis menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalam judul skripsi ini.

Adapun beberapa istilah yang perlu diberikan penjelasan adalah sebagai berikut :

1. Pemikiran yaitu memikirkan suatu kebenaran yang sudah ada untuk mendapatkan kebenaran yang baru, jadi pemikiran berarti suatu pandangan atau pendapat seseorang atau kelompok untuk melahirkan suatu gagasan.²
2. Abdullah Ad-Dumaiji adalah seorang guru besar di Fakultas Dakwah dan Ushuluddin, Universitas Ummul Qura, Mekah. Lahir di Riyadh, Arab Saudi pada tahun 1956. Beliau merupakan alumni dari Fakultas Syariah di Universitas King Abdulaziz, Makkah.
3. Konsep adalah “rancangan atau ide atau pengertian yang diabstrakan dari peristiwa konkret, gambaran mental dari objek, proses atau apapun yang

²Hasbullah Bakry, *Sistematika Filsafat* (Jakarta: Wijaya. 1978), h.38.

diluar bahasa yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain”.³

4. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang (pemimpin) untuk mempengaruhi orang lain (yaitu yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya), sehingga orang lain tersebut bertindak-laku sebagaimana yang dikehendaki oleh pemimpin tersebut.⁴ Kepemimpinan juga merupakan aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar mereka mau di arahkan untuk mencapai tujuan tertentu.⁵
5. Kepala Negara bisa diartikan sebagai seorang presiden atau seorang pemimpin dalam suatu Negara.
6. Perspektif berarti sudut pandang atau pandangan.⁶
7. Fiqh Siyasah yaitu salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁷
8. Relevansi yaitu hubungan, keterkaitannya.⁸ Jadi yang di maksud disini yaitu pemikiran Abdullah Ad-Dumaiji tentang kepemimpinan yang kemudian dihubungkan atau dikaitkan dengan Negara Indonesia.
9. Indonesia adalah suatu negara kepulauan yang merdeka sejak tanggal 17 agustus 1945.

³Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 725.

⁴Nugroho Dewanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Bandung: Pt. Yrama Widya, 2004), h.65.

⁵Thoha, *Kepemimpinan dalam manajemen* (Jakarta: Rajawali P ers, 1983), h. 123.

⁶Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.* h. 1062.

⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 4.

⁸Pius A Partanto, M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), h. 666.

Dari beberapa uraian diatas, maka yang dimaksud dalam judul proposal skripsi ini adalah suatu kajian mengenai pemikiran Abdullah Ad-Dumaiji tentang konsep kepemimpinan kepala negara yang ditinjau dengan konsep/praktek dalam kajian fiqh siyasah dan relevansinya dengan Negara Indonesia.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, di antaranya sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

- a. Dalam sebuah negara kehadiran seorang pemimpin sangatlah penting. Baik atau buruknya suatu negara di tentukan oleh pemimpin itu sendiri.
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam, serta menganalisis konsep kepemimpinan menurut Abdullah Ad-Dumaiji. Dan bagaimana jika konsep tersebut direlevansikan dengan negara Indonesia.

2. Alasan Subjektif

- a. Pokok bahasan skripsi ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Siyasah.
- b. Tersedianya literatur dan bahan-bahan atau data-data yang diperlukan dan menunjang sebagai referensi kajian dalam usaha menyelesaikan skripsi ini.

- c. Belum ada yang memilih judul proposal ini di Fakultas Syariah Jurusan Siyasah.

C. Latar Belakang Masalah

Di era reformasi ini, bangsa kita sedang berada dalam proses belajar bagaimana hidup di alam demokrasi. Masyarakat pada umumnya, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan khususnya, memerlukan pemimpin-pemimpin yang menghayati peran dan fungsinya. Bila masyarakat dan organisasi dipimpin oleh pemimpin yang demokratis, maka ada harapan bahwa bangsa kita akan berhasil menjalani proses demokratisasi dan kemudian mencapai cita-cita kehidupan yang adil makmur.⁹

Kepemimpinan adalah suatu proses yang kompleks di mana seseorang mempengaruhi orang-orang lain untuk mencapai suatu misi, tugas, atau suatu sasaran, dan mengarahkan organisasi dengan cara yang membuatnya lebih kohesif dan lebih masuk akal. Seseorang menjalani proses ini dengan mempergunakan atribut kepemimpinan (kepercayaan, nilai-nilai, etika, sifat, pengetahuan, dan keterampilan).¹⁰

Sejak dihapuskannya jabatan khilafah di Turki oleh golongan nasionalis pada tahun 1924, maka timbullah sikap pro dan kontra dikalangan umat Islam mengenai khilafah. Berbagai macam usaha dilakukan bahkan sampai pada tahap pertemuan internasional untuk menegakkan kembali sistem khilafah. Pada tahun yang sama Syarif Husen Amir Makkah membentuk dewan khalifah, dan itu pula tidak bertahan lama, karna beliau kehilangan kekuasaannya. Tahun 1925

⁹Bernardine, Susilo Supardo, *Kepemimpinan* (Yogyakarta: Andi offset , 2005), h. 3.

¹⁰*Ibid.*

direncanakan kembali akan diadakan kongres dunia Islam untuk membicarakan masalah khilafah di Kairo dengan mengundang seluruh perwakilan umat Islam, termasuk Indonesia. Namun kongres itu dibatalkan, dan baru terlaksana pada tanggal 13 mei 1926. Hasil kongres di Kairo ini mengakui bahwa khalifah dalam arti sebenarnya hanya terdapat pada zaman klasik, ketika seluruh daerah bisa di ikat dalam satu pemerintahan dan dalam organisasi, dan pada intinya hampir mustahil untuk menegakkan sistem khalifah kembali. Setelah kongres itu, perhatian dunia Islam terhadap masalah khilafah semakin menurun.¹¹

Dalam Fiqh Siyasah kata imamah biasanya diidentikan dengan khalifah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah imamah banyak digunakan oleh kalangan Syi'ah, sedangkan kata khalifah lebih populer menggunaannya dalam masyarakat Sunni. Hanya saja terdapat perbedaan mendasar antara kedua aliran ini dalam memahami imamamah. Kelompok Syi'ah memandang bahwa imamamah merupakan prinsip dari ajaran agama, sedangkan Sunni tidak memandang demikian.¹²

Penegakan institusi imamah atau khilafah, menurut para fuqaha', mempunyai dua fungsi, yaitu memelihara agama Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas yang digariskan Islam.¹³

Ahlusunah wal jamaah berpendapat bahwa imamah atau pemimpin wajib hukumnya, dan kaum muslimin harus memiliki seorang imam yang menegakan syiar-siyar agama, memberikan keadilan kepada pihak pihak yang dizalimi

¹¹Departemen Agama, *Ensiklopedia Islam* 2, CV. (Jakarta : Anda Utama , 1993), h. 633-635.

¹²Muhammad Iqbal, *Op.Cit.* h. 149.

¹³*Ibid.* h. 150.

dengan mengambil hak-hak tersebut dari pihak-pihak yang menzalimi.¹⁴ Seperti yang di terangkan dalam Qu'ran surah an-Nisa : 59.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹⁵

Menurut Abdullah Ad-Dumaiji, salah satu tujuan paling penting imamah adalah menjaga agama dan menata dunia dengan agama. Hal itu merupakan kewajiban paling utama yang di bebankan ke pundak imam. Kafirlah orang yang memisahkan antara agama dan politik, dan menata agama selain dengan agama Islam.¹⁶

Orang yang berhak memilih imam adalah kalangan cerdik pandai dari umat dan ulama, atau yang disebut dengan ahlul halli wal ‘Aqdi. Kalangan awam ataupun rakyat jelata tidak ikut campur dalam pemilihan ini. Oleh karna itu, orang berakal umumnya hanya akan memilih orang yang berakal dan yang paling layak untuk memegang jabatan penting ini. Untuk itu, tidak diperlukan adanya kampanye, dan membuang-buang dana besar secara batil untuk meraup suara bagi calon pemimpin pengganti, seperti halnya yang berlaku dalam sistem demokrasi modern. Imam menanggung banyak kewajiban yang harus ia tunaikan, dan ia juga

¹⁴Abdullah Ad-Dumaiji, *Al-Imamah al-uzhma inda ‘ahlissunnah wal jama’ah* “ diterjemahkan oleh Umar Mujtahid Cetakan ke-1 (Jakarta: Ummul Qura, 2016), h.56.

¹⁵Departemen Agama RI., *Op. Cit.* h. 87.

¹⁶Abdullah Ad-Dumaiji, *Op. Cit.* h. 638.

memiliki hak-hak yang dapat membantu pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut. Tidak disyariatkan bahwa imam haruslah orang terbaik di zamannya. Namun, yang lebih utama ialah memilih orang yang paling layak dan paling bermanfaat bagi kaum muslim.¹⁷

Dari uraian tersebut maka di sini penulis merasa tertantang untuk mengkaji hal-hal atau nilai-nilai serta pemikiran Abdullah Ad-Dumaiji yang berkaitan dengan pemimpin atau khilafah.

Berdasarkan dari hal-hal tersebut yang diuraikan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji dan meneliti guna penulisan skripsi ini dengan judul “Pemikiran Abdullah Ad-Dumaiji Tentang Konsep Kepemimpinan Kepala Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasah dan Relevansinya dengan negara Indonesia”

D. Rumusan Masalah

Merujuk pada pemaparan latar belakang masalah tersebut agar tidak menjadi penyimpangan-penyimpangan dan masalah yang menghambat tidak terselesaikan dari skripsi ini, maka penulis akan tekankan bahwa pokok bahasan yang akan menjadi titik fokus kajian skripsi ini adalah :

1. Bagaimana konsep kepemimpinan menurut Abdullah Ad-Dumaiji ?
2. Bagaimana analisis Fiqh Siyasah terhadap konsep kepemimpinan menurut Abdullah Ad-Dumaiji dan bagaimana relevansinya dengan Negara Indonesia?

¹⁷*Ibid.* h. 639.

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui konsep kepemimpinan menurut Abdullah Ad-Dumaiji
2. Mengetahui analisis fiqh siyasah terhadap konsep kepemimpinan menurut Abdullah Ad-Dumaiji dan relevansinya dengan negara Indonesia.

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai kepemimpinan.
 - b. Dapat membawa perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai rujukan tentang kepemimpinan tersebut.
 - c. Untuk menambah referensi, bahan literatur atau pustaka, khususnya dalam memahami masalah pemimpin.
 - d. Dapat menjadikan dasar bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam tentang permasalahan yang terkait.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Memberikan wawasan kepada penulis dan dalam rangka meningkatkan disiplin ilmu yang akan dikembangkan sesuai dengan bidang studi yang merupakan mata kuliah pokok dan diperdalam lebih lanjut lagi melalui studi-studi yang serupa dengan disiplin ilmu tersebut.

- b. Memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum ketatanegaraan di setiap perguruan tinggi di Fakultas Hukum.
- c. Memberikan sumbangan khususnya bidang ilmu ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui tentang pandangan siyasah Islam mengenai kepemimpinan dan pemikiran tokoh khususnya Abdullah Ad-Dumaiji.
- d. Memberikan informasi dan masukan bagi para peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian di bidang ini.

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu mengantarkan peneliti mendapat data yang valid dan otentik. Beranjak dari hal tersebut di atas, maka penulis perlu menentukan cara/metode yang dianggap penulis paling baik untuk digunakan dalam penelitian ini, sehingga nantinya permasalahan yang dihadapi akan mampu terselesaikan secara baik dan optimal. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Jenis penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*)¹⁸ yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori yang mempunyai

¹⁸Sutrisno Hadi, *Metode Reseach* (Yogyakarta: Andi Offset, 1987), h. 6.

hubungan dengan konsep kepemimpinan seperti buku, majalah, jurnal, dan lain-lain.¹⁹

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk termasuk penelitian yang menggunakan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.²⁰ Artinya dengan mendiskripsikan pemikiran seorang tokoh yaitu Abdullah Ad-Dumaiji mengenai kepemimpinan secara komperhensif untuk kemudian dianalisa secara logis,²¹ sehingga mendapat suatu kesimpulan terhadap pemikiran Abdullah Ad-Dumaiji tentang konsep kepemimpinan dalam pandangan fiqh siyasah serta bagai mana relevansinya dengan negara Indonesia.

2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, dengan mengkaji dan menelusuri bahan-bahan pustaka untuk menggambarkan fakta dan fenomena terhadap pemikiran-pemikiran Abdullah Ad-Dumaiji mengenai kepemimpinan, baik literatur primer maupun sekunder yang jadi penunjang dalam pemecahan pokok-pokok masalah.

¹⁹Muh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta :Ghalia Indonesia,th), h. 53.

²⁰Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 58.

²¹Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 26.

Adapun sumber datanya dapat dikategorikan menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari literatur yang langsung berhubungan dengan permasalahan penulisan yaitu berasal dari buku karya Abdullah Ad-Dumaiji yang di tulis oleh beliau seperti Konsep Kepemimpinan Dalam Islam .

b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian berupa buku, koran, media online, karya tulis, jurnal dan artikel-artikel yang dapat mendukung dalam penulisan penelitian dan relevan dengan penelitian ini.

3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, suatu teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai obyek penelitian²² dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variabel tertentu yang berupa catatan, buku, surat kabar, artikel dan lain sebagainya. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan serta dengan cara menelaah sumber-sumber kepustakaan tersebut.

²²Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Ed.) Cet. 4 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 236.

4. Pengelolaan Data

Secara umum pengelolaan data setelah data terkumpul dapat dilakukan:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis. Dan memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik itu sumber dari Al-Qur'an dan hadis, atau buku-buku literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. *Rekontruksi* data yaitu menyusun ulang secara terartur berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.²³

5. Analisis Data

Setelah data terhimpun melalui penelitian, selanjutnya data dapat dianalisa secara kualitatif yaitu “Suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti”.²⁴ Penulis menganalisa data dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu

²³Amiruddin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 107.

²⁴Lexy L Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. XIV (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2001), h. 3.

metode analisa data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum. Kemudian dari data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.²⁵

Metode ini digunakan dalam pengumpulan data dari berbagai literature yang berkaitan tentang pemikiran Abdullah Ad-Dumaiji tentang konsep kepemimpinan serta direlevansikan dengan Indonesia, kemudian dianalisa dan ditarik suatu kesimpulan sehingga menjadi suatu keputusan yang bersifat khusus.



²⁵Sutrisno Hadi, *Op. Cit.* h. 28.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEPEMIMPINAN

A. Kepemimpinan dalam Fiqh Siyasah

1. Definisi Kepemimpinan

Kata pemimpin di dalam bahasa Arab mempunyai beberapa istilah yaitu Imam, Khalifah, Amir, Malik dan Sulthan. Imam menurut bahasa berasal dari kata (Amma-yaummu-imaman) yang berarti ikutan bagi kaum, dan berarti setiap orang yang diikuti oleh kaum yang sudah berada pada jalan yang benar ataupun mereka yang sesat. Imam juga bisa diartikan sebagai pemimpin, seperti ketua atau yang lainnya. baik dia memberikan petunjuk ataupun menyesatkan. Imam disebut juga khilafah, yaitu penguasa dan pemimpin-tertinggi rakyat,²⁶ Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.²⁷

Imam juga berarti orang yang diikuti oleh suatu kaum. Kata imam lebih banyak digunakan untuk orang yang membawa pada kebaikan. Di samping itu, kata-kata imam sering dikaitkan dengan shalat. Oleh karena itu di dalam kepustakaan Islam sering dibedakan antara imam yang berkedudukan sebagai kepala negara atau yang memimpin umat Islam dan imam dalam arti yang mengimami shalat. Untuk yang pertama sering

²⁶Ali Ahmad As Salus, *Aqidah Al-Imamah, Inda as-Syari'ah al-Isna' Asyariyah* (terjemah) cet. Ke-1 (Jakarta: Grma Insani Press, 1987). h. 15.

²⁷"*Pengertian Pemimpin dalam Fiqh Siyasah dan Hukum Positif*", di akses dari: <http://meaningaccordingtoexperts.blogspot.com/2017/04/pengertian-pemimpin-dalam-fiqh-siyasah.html?m=1>. pada tanggal 27 November 2018 pukul 09:06.

digunakan istilah al-Imamah al-Udhma atau al-Imamah al-Kubra sedangkan untuk yang kedua sering disebut al-Imamah al-Shugra. Biasanya kata-kata imam hanya digunakan untuk menyebut seseorang yang memimpin di dalam bidang agama.²⁸

Dari sini kata khalifah sering diartikan sebagai pengganti, karena orang yang menggantikan itu berada atau datang sesudah orang yang digantikan dan ia menempati tempat dan kedudukan orang tersebut. Khalifah juga bisa berarti seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan orang yang memberi wewenang.²⁹

2. Dasar Hukum Kepemimpinan

a. Al-Quran

Secara etimologi, kepemimpinan dalam artian khilafah, berasal dari kata khalafa yang mempunyai makna pimpin, sedangkan khalifah berarti pemimpin.³⁰ Sebagai mana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭ ۚ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَیَخْنَ نُّسَبَۃًۭ بِحَمْدِكَ وَتُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.*

³⁰Ridwan Yahya, *Kepemimpinan Dalam Al-Quran* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009),

Artinya : *"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." ³¹*

Achmad Chodjim mengutip tafsir al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab, yang mana dalam tafsir al-Misbah tersebut mengatakan bahwa ayat ini merupakan penyampaian Allah kepada para malaikat tentang rencana-Nya menciptakan manusia dimuka bumi ini. Penyampaian kepada mereka menjadi sangat penting, karena malaikat akan dibebani sekian tugas menyangkut manusia. Ada yang akan bertugas mencatat amal-amal manusia, ada yang bertugas memelihara, ada yang membimbingnya. Penyampaian ini bisa jadi merupakan bagian dari proses penciptaan alam raya dan kesiapannya untuk dihuni manusia pertama (Adam) dengan nyaman. Maksud Allah ini kemudian didengar oleh malaikat, lalu malaikat bertanya tentang makna penciptaan tersebut. Mereka menduga bahwa khilafah (manusia) ini akan merusak dan menumpahkan darah.³²

³¹Departemen Agama RI., *Op. Cit.* h. 6.

³²Achmad Chodjim, *Membangun Surga*, cet ke-1 (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), h. 174.

Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”³³

Dalam ayat tersebut Allah mewajibkan kaum muslimin untuk taat kepada Allah swt dan Rasulnya dan diperintahkan pula untuk taat kepada pemimpin atau ulil amri dari kalangan mereka. Tentu saja, apabila pemimpinnya memerintahkan kepada hal-hal yang baik. Apabila pemimpin tersebut mengajak kemungkaran wajib hukumnya untuk menolak.³⁴ Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa mengangkat seorang pemimpin merupakan suatu kewajiban bagi kaum muslimin.

b. Hadist

Riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah, dari Nabi saw, beliau bersabda:

³³Departemen Agama RI., *Op. Cit.* h. 87.

³⁴ *Kandungan Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 59 Tentang Taat Kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri* ”, di akses dari: <http://www.bacaanmadani.com/2018/01/kandungan-al-quran-surat-nisa-ayat-59.html?m=1>, pada tanggal 26 November 2018 pukul 09:30.

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

Artinya : *“Jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya.”* (HR Abu Dawud dari Abu Hurairah).³⁵

Hadits ini secara jelas memberikan gambaran betapa Islam sangat memandang penting persoalan memilih pemimpin. Hadits ini memperlihatkan bagaimana dalam sebuah kelompok Muslim yang sangat sedikit (kecil) pun, Nabi memerintahkan seorang Muslim agar memilih dan mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin.

Kisah pembaiatan Abu Bakar di Saqifah Bani Saidah sesaat pasca wafatnya Rasulullah adalah bukti lain betapa pentingnya arti kepemimpinan ini dalam Islam. Saat jasad Nabi yang belum lagi dimakamkan, para sahabat lebih mendahulukan memilih khalifah pengganti Nabi dari pada menyelenggarakan jenazah beliau yang agung dan mulia.³⁶

Hadis Riwayat Muslim

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَاعِيَّتِهِ وَالْأَمِيرُ رَاعٍ

Artinya : *“Masing-masing dari kalian adalah pemimpin, dan masing-masing dari kalian bertanggung jawab atas*

³⁵ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar Al Kutub, t.th), juz tsalis, h. 495.

³⁶Cholis Akbar, *“Enam Dalil Memilih Pemimpin dalam Islam”*, di akses dari <http://m.hidayatullah.com/none/read/2016/03/22/91574/fiqh-kepemimpinan.html>, pada tanggal 19 maret 2018 pukul 18:30.

apa yang dia pimpin. Seorang penguasa adalah pemimpin, (dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinya)". (HR. Muslim)³⁷

3. Ciri-ciri Pemimpin Menurut Islam

Dalam Islam kepemimpinan merupakan suatu kemampuan seseorang untuk memotivasi tingkah laku orang lain yang didasarkan kepada syariat Islam. Ciri-ciri seseorang pemimpin Dalam Islam yaitu³⁸:

- a. Taat Kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Ali-Imran ayat 32:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾

Artinya: *"Katakanlah "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, Maka Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir".³⁹*

Ketaatan harus diberikan kepada pemimpin, selama dirinya taat kepada Allah dan Rasulnya. Jika seorang pemimpin sudah tidak lagi mentaati Allah dan Rasulnya Maka tidak ada lagi ketaatan bagi dirinya.

- b. Beriman dan beramal saleh

Dalam ajaran Islam, seorang pemimpin haruslah beriman Kepada Allah swt dan selalu beramal shaleh, Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. al-Bayyinah ayat 7:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾

³⁷Imam Muslim, *Shohih Muslim*, (Libanon: Dar Al Kutub Bairud, t.th), jus II, h. 125.

³⁸Siti Patimah, *Manajemen Kepemimpinan Islam Aplikasinya dalam Organisasi Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 19-20.

³⁹Departemen Agama RI., *Op. Cit.* h. 54.

Artinya : *“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk”*.⁴⁰

c. Berilmu

Seorang pemimpin haruslah memiliki pengetahuan yang sangat luas, tidaklah mungkin suatu organisasi dipimpin oleh seorang pemimpin yang sangat dangkal ilmunya. Karna Seorang pemimpin haruslah memiliki pengetahuan yang lebih luas jika di bandingkan dengan bawahannya. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. al-Mujadilah ayat 11:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya : *“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”*.⁴¹

d. Berpegang teguh kepada hukum Allah swt

Seorang pemimpin haruslah berpegang tegus kepada hukum Allah yang mana itu merupakan suatu kewajiban utama bagi seorang pemimpin, yang mana seorang pemimpin akan mendapatkan jalan

⁴⁰ Ibid. h. 598.

⁴¹ Ibid. h. 543.

kebenaran yang akan memimpinnnya untuk mengemban tugas yang berada dipundaknya. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. al-Maidah ayat 45:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya : “Barangsiapa tidak berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”.⁴²

e. Amanat

Seorang pemimpin harus mampu menjalankan suatu kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat kepada dirinya, karna itu merupakan suatu tanggung jawab yang sangat besar , baik dengan Allah swt maupun dengan masyarakatnya. Sebagaimana Firman Allah swt dalam QS. al-Anfal ayat 27 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui”.⁴³

f. Adil

Seorang pemimpin haruslah memilki sifat yang adil terhadap yang dipimpinnnya dengan tidak membedakan apapun, baik suku, ras,

⁴² Ibid. h.115

⁴³ Ibid. h. 180.

maupun golongan. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. an-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.⁴⁴

4. Karakteristik/ Syarat Calon Pemimpin Negara

Secara umum persyaratan calon seorang pemimpin negara adalah adanya kemampuan pada diri calon seorang pemimpin untuk dapat memimpin orang lain kearah pencapaian tujuan sebuah lembaga yang dipimpinnya, serta dapat menjalin komunikasi antara individu yang satu dengan individu lainnya, karna sebuah institusi atau organisasi akan selalu bergerak atas dasar interaksi social antar manusia.

Orang-orang yang dipilih sebagai kandidat-kandidat atau calon pemimpin negara adalah mereka yang memiliki kualifikasi dan karakteristik calon pemimpin yang antara lain yaitu :

- a. Memiliki kemampuan untuk memikul tanggung jawab.
- b. Kemampuan untuk menjadi perseptif.
- c. Kemampuan untuk menanggapi secara objektif.

⁴⁴Ibid. h. 277.

- d. Kemampuan untuk menetapkan prioritas secara tepat
- e. Kemampuan untuk berkomunikasi.⁴⁵

Yahya Athalib dalam bukunya menjelaskan bahwa ada lima karakter yang harus dikembangkan oleh pemimpin Islam dalam mewujudkan kemaslahatan umat dalam sebuah negara, diantaranya yaitu :

- a. Tau kemana waktu harus diarahkan. Kuasai waktu dan jangan biarkan waktu mengontrol anda, dengan menjadikan setiap saat bekerja untuk Islam.
- b. Mengarah pada hasil yang konkrit. Memusatkan perhatian pada hasil ketimbang dari pekerjaan itu sendiri. Lihat apa yang ada dibalik kerja dan tetaplah tujuan membangun kekuatan bukan kelemahan termasuk diri anda dan para sahabat anda. Akui kelebihan dan kelemahan anda dan mau menerima kelebihan orang lain tanpa merasa kedudukan anda terancam.
- c. Memusatkan perhatian pada bidang-bidang utama, dimana kerja keras secara terus menerus yang akan memberikan hasil yang cemerlang. Lakukan hal tersebut dengan memperhatikan prioritas yang telah ditentukan dengan ketat.
- d. Bertakwalah kepada Allah dengan meletakkan cita-cita yang tinggi. Jangan batasi diri anda dengan persoalan yang mudah dan aman. Sepanjang anda bekerja untuk Allah, janganlah anda merasa takut.⁴⁶

⁴⁵Kartini Kartono, *Pimpinan dan Kepemimpinan* (Jakarta: Rajawali, 1983), h. 39.

Mengenai karakteristik calon pemimpin negara ini Sidi Ritauddin dalam karya ilmiahnya menyebutkan beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang calon pemimpin, yaitu sebagai berikut:

- a. Sehat jasmani dan rohani, artinya memiliki energy fisik dan spiritual yang berlimpah dan keuletan dalam bekerja. Ia rela bekerja atas dasar pengabdian dan prinsip kebaikan, serta loyal terhadap kemajuan lembaga yang dipimpinnya. Pemimpin yang cacat fisik dan mentalnya akan menghancurkan organisasi atau lembaga yang dipimpinnya. Termasuk cacat mental bagi orang yang memiliki catatan hitam masa lalunya.
- b. Bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, dalam pengertian orang yang committed atau konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya serta menjauhi segala larangannya.⁴⁶
- c. Memiliki kemampuan untuk memiliki tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, aspek ini dapat diukur dari aspek manajerial, karena manajemen memungkinkan terjadinya perpaduan semua usaha dan aktifitas yang mengarah pada tujuan institusi/ organisasi. Juga menciptakan kerjasama yang baik demi kelancaran dan

⁴⁶Hisyam Yahya At Thalib. *Panduan Latihan Bagi Gerakan Islam* (Jakarta: Media Dakwah, 1999), h. 56-57.

⁴⁷Kriteria ini secara implicit juga mencakup karakteristik idealistik seperti : jujur, amanah, cerdas, dan tidak akan melakukan perbuatan tercela seperti judi, minum-minuman keras, mencuri dan sifat lainnya yang berhaluan dengan ajaran Islam.

efektifitas kerja, untuk mempertinggi daya guna semua sumber dan mempertinggi hasil guna.⁴⁸

- d. Mempunyai kemampuan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yaitu: planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (penggerak, aktualisasi), dan controlling (pengawasan).

Mengangkat pemimpin dalam suatu negara itu adalah wajib. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah siapa yang pantas diangkat menjadi pemimpin dalam suatu negara, karena tidak sembarang orang patut dipilih untuk dijadikan sebagai pemimpin.

Secara teoritis dan idealis, Islam tidak hanya menuntut seorang pemimpin negara harus cakap dalam segala sesuatunya, hal yang paling penting adalah sikap keteladanan dari seorang pemimpin terhadap bawahannya, memiliki akhlaq yang baik dan sifat-sifat dasar seorang pemimpin. Konsepsi mengenai persyaratan kepemimpinan negara selalu dikaitkan dengan beberapa hal penting yang telah diwariskan melalui sifat-sifat Rasulullah yaitu :

- a. Ikhlas karena Allah semata.
- b. Berdaya ingat, kuat, bijaksa, cerdas, berpengalaman luas.
- c. Penyantun, kasih sayang, lemah lembut, dan ramah.
- d. Bersahabat.

⁴⁸Manajemen ini juga dapat disebut sebagai pengendali suatu usaha : yaitu merupakan : (1) Proses pendelegasian/ pelimpahan wewenang kepada beberapa penanggung jawab dengan tugas-tugas kepemimpinan, dan (2) Proses pergerakan serta bimbingan pengendalian semua sumber daya manusia dan sumber materil dalam kegiatan mencapai sasaran organisasi. Manajemen sendiri secara sederhana adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dengan menggunakan tenaga orang lain. Lihat Kartini Kartono, *Op. Cit.*, h. 148.

- e. Berani dan sportif.
- f. Shidiq.
- g. Tawadhu.
- h. Pemaaf.
- i. Menepati janji.
- j. Sabar.
- k. *Iffah* dan *kiram*.⁴⁹
- l. *Wara'* dan *zuhud*.⁵⁰
- m. Adil dan jujur.⁵¹

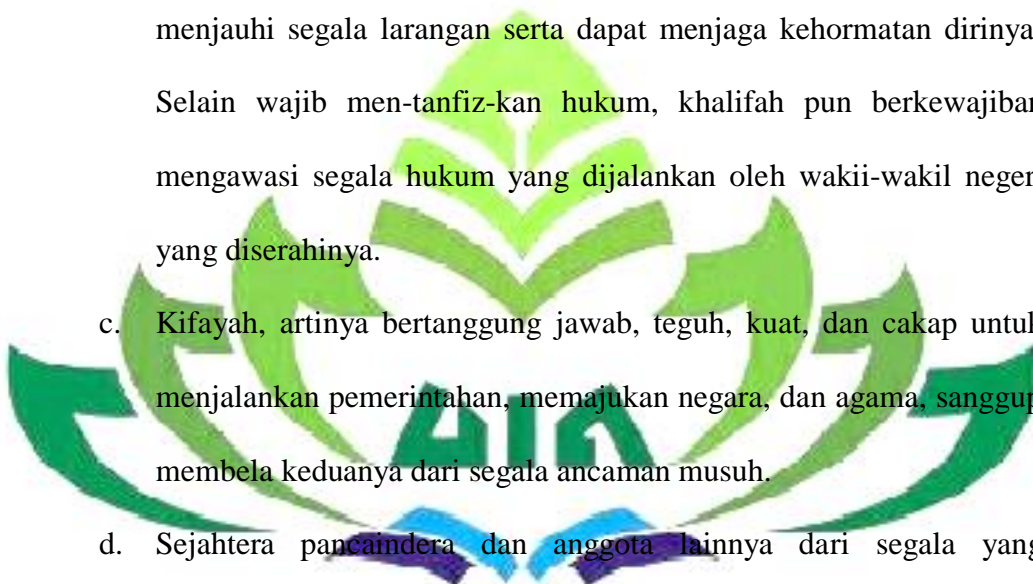
Pandangan Al-Qura'an terhadap system kepemimpinan negara sangatlah tegas, bahwa landasan pemilihan figure kepemimpinan negara yang kharismatik, ideal, dan berwawasan luas adalah pemimpin yang mematuhi hukum-hukum Allah swt dan mentaati tuntunan Rasulullah saw. Jika sistem pemilihan didasarkan pada system demokrasi (*syuro*) yang diajarkan al-Qur'an, dan pemimpin yang dipilih tersebut adalah pemimpin yang benar-benar mampu, cakap, dan terampil, serta integritas kepribadiannya adalah al-Qur'an dan Sunnah Nabi, maka dapat dipastikan ia akan membawa maslahat dan kemajuan umat.

Selain itu orang yang dicalonkan untuk menjadi khalifah hendaklah mempunyai sifat dan pribadi sebagai berikut:

⁴⁹ *Iffah* artinya menahan diri sepenuhnya dari perkara-perkara yang Allah haramkan dan *kiram* adalah tidak mudah untuk tunduk kepada hawa nafsu.

⁵⁰ *Wara'* artinya menjauhkan diri dari hal syubhat (keadaan yang samar tentang kehalalan atau keharaman. Sedangkan *zuhud* artinya meninggalkan hal-hal yang berbuat dosa.

⁵¹ Syaikh Mustafa Masyhur, *Fiqh Dakwah*, cet. 1, (Jakarta: Cahaya Umat, 2000), h. 410-415.

- 
- a. Berpengetahuan luas dalam arti yang sebenarnya, bukan berdiploma tinggi, karena Ia akan memimpin dan men-tanfiz-kan segala hukum Allah dan peraturan-peraturan-Nya, baik terhadap rakyat yang beragama, terhadap orang-orang yang tidak beragama, maupun terhadap negara. Orang yang tidak mengetahui hukum Allah tentunya tidak dapat menjalankannya dengan sempurna.
 - b. Adil dalam arti luas, berarti menjalankan segala kewajiban dan menjauhi segala larangan serta dapat menjaga kehormatan dirinya. Selain wajib men-tanfiz-kan hukum, khalifah pun berkewajiban mengawasi segala hukum yang dijalankan oleh wakii-wakil negeri yang diserahinya.
 - c. Kifayah, artinya bertanggung jawab, teguh, kuat, dan cakap untuk menjalankan pemerintahan, memajukan negara, dan agama, sanggup membela keduanya dari segala ancaman musuh.
 - d. Sejahtera pancaindera dan anggota lainnya dari segala yang mengurangi kekuatan berpikir dan kekuatan Jasmani atau tenaganya.⁵²

Sebagian ulama berpendapat disyaratkan bahwa yang menjadi khalifah itu dari bangsa Quraisy Mereka beralasan pada beberapa zahir hadis, di antaranya sabda Rasulullah saw., “imam-imam itu dari bangsa Quraisy”, dan sabda beliau, "dahulukanlah bangsa Quraisy, dan janganlah kamu mendahuluinya." Ulama-ulama yang lain menafsirkan

⁵²*Ibid.* h. 500.

hadis-hadis yang serupa ini sebagai berikut: Sungguhpun beberapa hadis menerangkan bahwa khalifah itu hak bangsa Quraisy, tetapi dasar hadis-hadis itu ialah karena bangsa Quraisy mempunyai sifat-sifat berani, kuat, teguh pendiriannya, dan mempunyai hubungan erat antara satu dengan yang lainnya. Maka dengan sifat inilah akan dapat terjamin teraturnya kedaulatan.

Memang diakui oleh semua golongan Arab yang lain bahwa bangsa Quraisy mempunyai sifat mulia dan lebih terhormat dibandingkan golongan-golongan Arab yang lain. Maka syarat tersebut ada kemungkinan menimbulkan pertentangan yang membawa kekacauan dan merenggangkan persatuan, sedangkan hal yang demikian tentu tidak dikehendaki. Jika pimpinan diserahkan kepada bangsa Quraisy yang kuat, kekacauan dan pertentangan tidak akan terjadi karena bangsa Quraisy kuat dan cakap untuk menenangkan kegelisahan dan mendamaikan segala perselisihan. Bangsa Quraisy mempunyai kesanggupan untuk membawa umat ke arah kesempurnaan, baik dengan cara perdamaian ataupun dengan kekerasan. Maka kelebihan tersebutlah yang mendukung kedudukan khalifah jatuh ke tangan bangsa Quraisy, sedangkan agama tidak menentukan hukum-hukum pada suatu bangsa, suatu keturunan atau partai, tetapi agama adalah untuk semua umat manusia. Dengan demikian, jelaslah bagi kita bahwa yang dimaksud sifat kifayah di sini ialah berani bertanggung jawab, teguh, kuat, mempunyai rasa persatuan, dan cakap untuk menjalankan pemerintahan. Jadi, yang

dijadikan syarat oleh Nabi saw. ialah sifat tersebut. Barang siapa di antara golongan atau partai yang bersifat demikian dialah yang berhak memegang tampuk pimpinan negara. Keterangan ini diambil dari kitab tarikh Itmamul-Wafa karangam Muhammad Al-Hudari dan dari Muqaddimah Ibnu Khaldun.

5. Syarat-syarat memilih pemimpin.

Sebagaimana kita telah mengetahui, yang berhak memilih khalifah(pemimpin) ialah ahlul halli wal 'aqdi (wakil-wakil dari rakyat). Mereka hendaklah bersifat sebagai berikut:

- a. Adil dalam arti kata yang sebenarnya. Yang dimaksud dengan adil dalam hal ini ialah orang yang mengerjakan kewajibannya serta menjauhkan diri dari segala maksiat serta menjaga kehormatan dirinya.
- b. Ahli ilmu dan berpengetahuan luas, agar ia mengetahui siapa yang lebih berhak dipilih. Kata Rasyid Rida, "Sifat ilmu berlebih berkurang menurut keadaan masa. Sekarang masa kemajuan, maka hendaklah dalam majelis syura ahlul halli wal 'aqdi itu cukup mempunyai orang-orang yang berpengetahuan luas yang diperlukan di masa sekarang, umpamanya ahli negara, penyelidikan serta pengetahuan yang berhubungan dengan keadaan rakyat di negara-negara sekitar negara kita, mengetahui negara-negara tetangganya, baik mengenai politik, ekonomi, perdagangan, kebudayaan, dan lain-

lain, yaitu semua pengetahuan yang berhubungan dengan tegaknya dan teraturnya negara.”

- c. Adapun ilmu yang menyampaikan seseorang pada derajat mujtahid menjadi syarat untuk jumlah anggota syura, berarti dalam majelis syura itu hendaklah ada orang alim yang mencapai derajat mujtahid supaya dapat menyesuaikan peristiwa peristiwa yang pterjadi dengan hukum syara Islam.
- d. Mempunyai pendirian yang teguh (percaya pada diri sendiri), bijaksana, serta pandai menarik perhatian, pandai menyelidiki sesuatu agar ia dapat mengatur dan mempertimbangkan kemaslahatan rakyat dan mengerti jalannya sejarah hidup calon-calon khalifah itu. Yang dimaksud dengan pandai dalam agama Islam tidak didasarkan dengan adanya Ijazah diploma sebagaimana keadaan di zaman sekarang ini tetapi bergantung pada ada atau tidaknya pengetahuannya dilihat dari kecakapan dan kesanggupannya bekerja. sesuai dengan kepentingan yaitu keadaan sesuatu yang akan dipertanggung jawabkan kepadanya. Akibat dan syarat-syarat ini ialah: Kalau tidak mencukupi syarat-syarat tersebut, kedaulatan tidak dianggap daulah Islamiyyah, dan tidak wajib atas umat Islam.⁵³

6. Kewajiban Pemimpin.

Garis besar kewajiban khalifah(pemimpin) adalah sebagai berikut:

⁵³Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 499.

- 
- a. Membela dan menghidupkan agama, menjalankan nas nas yang disepakati (mujma' alaihi) serta memberi keleluasaan kebebasan kepada rakyat dalam masalah ijtihadiyah yang bersangkutan dengan amal masing-masing, baik dalam ilmu pengetahuan maupun yang bersangkutan dengan pekerjaan, baik berupa ibadah atau berupa urusan penghidupan. Adapun yang bersangkutan dengan pemerintahan, seperti politik negara, keamanan, dan hukum pengadilan, maka khalifah berhak menguatkan pendapatnya di dalam masalah ijtihadiyah sesudah bermusyawarah dengan ahlul halli wal'aqdi.
- b. Mentanfiz-kan hukum antara orang-orang yang berselisih atau mendamaikannya, begitu juga hukum yang bersangkutan dengan Allah semata-mata, seperti hudud. Ringkasnya, sebagai pengatur pengadilan.
- c. Menjaga keamanan umum agar penghidupan segenap umat manusia terjamin dengan aman tenteram (urusan kepolisian).
- d. Bermusyawarah dengan wakiI-wakil rakyat dalam tiap-tiap urusan yang tidak ada nas-nya yang qat'i (yang diyakini) dan tidak pula ada ijma', terutama hal-hal yang menyangkut kenegaraan seperti peperangan, mengenai politik luar dan dalam negeri.
- e. Mengatur penjagaan batas-batas negeri dengan sekuat-kuatnya, sehingga merupakan kekuatan yang dapat menolak segala

- kemungkinan dari serangan musuh yang akan mengganggu keamanan atau ketenteraman dalam negeri.
- f. Jihad, melakukan peperangan terhadap musuh apabila telah sampai pada batas-batas yang diizinkan oleh agama, sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam kitab “Jihad”. Yang dimaksud dengan kewajiban no. 5 dan no. 6 ini ialah mengatur ketentaraan.
 - g. Mengatur kemakmuran menurut apa yang diizinkan oleh agama,
 - h. Hendakiah ia bekerja sendiri untuk mengamat-amati dan memperhatikan soal-soal yang diserahkan kepada wakil-wakilnya. Hendaklah bergaul dengan seluruh lapisan masyarakat, tidak boleh mengasingkan diri dan bersenang-senang sendiri.⁵⁴

B. Kepemimpinan Kepala Negara Di Indonesia

Setiap masyarakat dan kelompok yang sangat kecil sampai kepada yang besar, dari masa dahulu hingga masa kini harus ada yang melaksanakan fungsi pemimpin. Kualitas suatu bangsa untuk mewujudkan apa yang diinginkan dan apa yang diperbuatnya, ditentukan oleh kualitas pemimpinnya. Kepemimpinan suatu masyarakat mencerminkan sifat tujuan dan kebutuhan masyarakat itu. Pemimpin dapat menjadi pembawa atau penyebab proses perubahan dalam masyarakat yang dipimpinnya.⁵⁵

Indonesia sejak awal kemerdekaannya menyatakan sebagai negara demokrasi (berkedaulatan rakyat). Demokrasi merupakan konsep atau perangkat kekuasaan

⁵⁴*Ibid.* h. 502.

⁵⁵H. Abu Daud Busroh, *Capita Selecta Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 117.

yang mekanisme pengelolaan negaranya berdasarkan kehendak suara rakyat mayoritas. Demokrasi menganut prinsip kebebasan, prinsip kesamaan dan prinsip kehendak rakyat mayoritas. Kekuasaan diamanatkan kepada para wakil yang dipilih melalui pemilihan yang bebas berdasarkan suara mayoritas rakyat.⁵⁶

Di Negara Indonesia syarat untuk menjadi Presiden tertuang dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 pasal (5) mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Yang mana calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;
3. Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
4. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
5. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
7. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
8. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;

⁵⁶Hepi Riza Zen “Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah” (On-Line, tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/205> (22 Februari 2019 Pukul 14:00 Wib)

9. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
10. Terdaftar sebagai Pemilih;
11. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;
12. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
13. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
14. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
15. Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
16. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
17. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan

18. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.⁵⁷

Selain itu bangsa Indonesia yang sedang membangun ini memerlukan seorang pemimpin yang berkualitas, berwibawa, dan berpenampilan serta sifat-sifat kebapak-bapakan, agar dalam waktu tertentu yang sudah direncanakan dari Pelita demi Pelita, makin menghampiri gerbang bangunan kesejahteraan masyarakat, yang akan menjadi kekuatan yang dapat memutar roda kemajuan yang bersumber dari dalam bangsa kita sendiri.⁵⁸ Oleh karena itu gaya kepemimpinan tersebut sangat di butuhkan oleh oleh bangsa ini.

Gaya kepemimpinan, mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin, yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu. Pengertian gaya kepemimpinan yang demikian ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Davis dan Newstrom. Keduanya menyatakan bahwa pola tindakan pemimpin secara keseluruhan seperti yang dipersepsikan atau diacu oleh bawahan tersebut dikenal sebagai gaya kepemimpinan.

Menurut Tjiptono gaya kepemimpinan merupakan suatu cara yang digunakan pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahannya. Sementara itu, pendapat lain menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku (kata-kata dan tindakan-tindakan) dari seorang pemimpin yang dirasakan oleh orang lain.⁵⁹

⁵⁷Lihat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 Mengenai Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 5.

⁵⁸H. Abu Daud Busroh, *Op. Cit.*, h. 117.

⁵⁹Manik Sukoco, "Perbedaan Gaya Kepemimpinan Presiden dan Bagaimana Menyikapinya", di akses dari <http://www.kompasiana.com/maniksukoco/589589ce9197730c1c3a7c53/perbedaan-gaya->

Seperti halnya pemimpin-pemimpin kita yang dulu maupun yang sekarang, mulai dari Era Orde Lama yaitu masa Soekarno, lalu Era Orde Baru pada masa Suharto, dan Era Reformasi pada masa Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi yang semuanya memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda, termasuk dalam sistem pemilihannya.

1. Presiden Soekarno.

Presiden Soekarno selaku Presiden pertama Republik Indonesia terpilih melalui musyawarah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, tepat satu hari setelah beliau menyampaikan Proklamasi Kemerdekaan. Selama puluhan tahun beliau menjabat sebagai Presiden, tidak pernah ada lagi proses pemilihan Presiden, bahkan Soekarno pun diangkat sebagai Presiden seumur hidup melalui ketetapan MPR.⁶⁰

Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Ir. Soekarno berorientasi pada moral dan etika ideologi yang mendasari negara atau partai, sehingga sangat konsisten dan sangat fanatik, cocok diterapkan pada era tersebut. Sifat kepemimpinan yang juga menonjol dan Ir. Soekarno adalah percaya diri yang kuat, penuh daya tarik, penuh inisiatif dan inovatif serta kaya akan ide dan gagasan baru. Sehingga pada puncak kepemimpinannya, pernah menjadi panutan dan sumber inspirasi pergerakan kemerdekaan dari bangsa-bangsa Asia dan Afrika serta

kepemimpinan-presiden-dan-bagaimana-menyikapinya.. pada tanggal 26 November 2018 pukul 08:20.

⁶⁰Fajar Muhammad Rhydo, "Pemilihan Presiden dari Masa ke Masa" , diakses dari <https://www.kompasiana.com/bemfeui2014/54f7189ea33311190b8b491f/%20pemilihan-presiden-dari-masa-ke-masa>, pada tanggal 1 Maret 2018 pukul 11:01.

pergerakan melepas ketergantungan dari negara-negara Barat (Amerika dan Eropa).⁶¹

2. Presiden Soeharto

Kejatuhan Soekarno pada pertengahan dekade 60-an menandai diawalinya masa-masa keruntukan Orde Lama dan kebangkitan Orde Baru yang mana kekuasaan Soeharto yang ditunjuk oleh MPR sebagai pemegang mandat jabatan Presiden dalam Sidang Istimewa MPR. Pada masa-masa berikutnya, pemilihan Presiden dilakukan dalam forum Sidang Umum MPR. Pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara, dan yang mempunyai hak suara untuk memilih Presiden hanyalah anggota MPR. Dikarenakan mayoritas anggota MPR berasal dari Fraksi Golkar dan ABRI yang merupakan penyokong utama kekuasaan Soeharto, maka Soeharto pun selalu terpilih secara aklamasi dalam setiap pemilihan Presiden yang ia ikuti. Selain itu, pada masa tersebut Undang-Undang Dasar tidak memberikan batasan periode seseorang berhak menjadi Presiden. Kolaborasi dari dua hal inilah yang membuat kekuasaan Soeharto mencengkram kuat Republik ini selama puluhan tahun.

Gaya Kepemimpinan Presiden Soeharto merupakan gabungan dari gaya kepemimpinan Proaktif-Ekstraktif dengan Adaptif-Antisipatif, yaitu gaya kepemimpinan yang mampu menangkap peluang dan melihat tantangan sebagai sesuatu yang berdampak positif serta mempunyai visi

⁶¹Henny Sovya, “*Mengenal Gaya Kepemimpinan Presiden di Indonesia*”, diakses dari : https://www.kompasiana.com/hennysovy/mengenal-gaya-kepemimpinan-presiden-di-indonesia_552c5c1c6ea834f7738b4571, pada tanggal 1 Maret 2018 pukul 11:00.

yang jauh ke depan dan sadar akan perlunya langkah-langkah penyesuaian.

Tahun-tahun pemerintahan Suharto diwarnai dengan praktik otoritarian di mana tentara memiliki peran dominan di dalamnya. Kebijakan dwifungsi ABRI memberikan kesempatan kepada militer untuk berperan dalam bidang politik di samping perannya sebagai alat pertahanan negara. Demokrasi telah ditindas selama hampir lebih dari 30 tahun dengan mengatasnamakan kepentingan keamanan dalam negeri dengan cara pembatasan jumlah partai politik, penerapan sensor dan penahanan lawan-lawan politik. Sejumlah besar kursi pada dua lembaga perwakilan rakyat di Indonesia diberikan kepada militer, dan semua tentara serta pegawai negeri hanya dapat memberikan suara kepada satu partai penguasa Golkar.

Bila melihat dari penjelasan singkat di atas maka jelas sekali terlihat bahwa mantan Presiden Soeharto memiliki gaya kepemimpinan yang otoriter, dominan, dan sentralistik

3. B.J. Habibie

Kejatuhan Orde Baru ditandai dengan mundurnya bapak Soeharto dan naiknya Era Reformasi pada Mei 1998 yang menjadikan B.J.Habibie selalu wakil presiden pun mengambil alih jabatan Presiden hingga dilaksanakan pemilihan presiden selanjutnya.

Gaya kepemimpinan Presiden Habibie adalah gaya kepemimpinan Dedikatif-Fasilitatif, merupakan sendi dan Kepemimpinan Demokratik.

Pada masa pemerintahan B.J Habibie ini, kebebasan pers dibuka lebar-lebar sehingga melahirkan demokratisasi yang lebih besar. Pada saat itu pula peraturan-peraturan perundang-undangan banyak dibuat. Pertumbuhan ekonomi cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Habibie sangat terbuka dalam berbicara tetapi tidak pandai dalam mendengar, akrab dalam bergaul, tetapi tidak jarang eksplosif. Sangat detailis, suka uji coba tapi kurang tekun dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Dalam penyelenggaraan negara Habibie pada dasarnya seorang liberal karena kehidupan dan pendidikan yang lama di dunia barat.

Gaya komunikasinya penuh spontanitas, meletup-letup, cepat bereaksi, tanpa mau memikirkan risikonya. Tatkala Habibie dalam situasi penuh emosional, ia cenderung bertindak atau mengambil keputusan secara cepat. Seolah ia kehilangan kesabaran untuk menurunkan amarahnya. Bertindak cepat, rupanya, salah satu solusi untuk menurunkan tensinya. Karakteristik ini diilustrasikan dengan kisah lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Habibie digambarkan sebagai pribadi yang terbuka, namun terkesan mau menang sendiri dalam berwacana dan alergi terhadap kritik.

4. Abdurahman Wahid

Setelah masa jabatan Habibie berakhir maka dilakukanlah pemilihan Presiden pada tahun 1999 dengan sistem yang masih sama pada masa orde baru, yaitu mekanisme voting di lembaga MPR. Hal yang

membuatnya berbeda adalah ketika Fraksi Golkar dan ABRI tidak lagi menjadi fraksi mayoritas di MPR. Hasilnya, yang mendapat mandate sebagai Presiden selanjutnya adalah Abdurrahman Wahid yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa dan disokong penuh oleh gabungan partai-partai Islam.

Gaya kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid adalah gaya kepemimpinan Responsif-Akomodatif, yang berusaha untuk mengagregasikan semua kepentingan yang beraneka ragam yang diharapkan dapat dijadikan menjadi satu kesepakatan atau keputusan yang memiliki keabsahan. Pelaksanaan dan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan diharapkan mampu menggerakkan partisipasi aktif para pelaksana di lapangan, karena merasa ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan kebijaksanaan

Kekuasaan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tidak berlangsung lama, pergolakan politik membuat beliau terpaksa meninggalkan istana setelah MPR mencabut mandat yang pernah diberikan kepada beliau sebagai orang nomor satu di Indonesia.

5. Megawati Soekarno Putri

Megawati Soekarnoputri yang kala itu menjabat Wakil Presiden, dilantik untuk menggantikan Gus Dur sebagai Presiden dan mencatatkan dirinya dalam sejarah sebagai Presiden wanita pertama Indonesia, sekaligus orang kedua yang pernah menduduki jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Gaya kepemimpinan megawati yang anti kekerasan itu tepat sekali untuk menghadapi situasi bangsa yang sedang memanas. Megawati lebih menonjolkan kepemimpinan dalam budaya ketimuran. Ia cukup lama dalam menimbang-nimbang sesuatu keputusan yang akan diambilnya. Tetapi begitu keputusan itu diambil, tidak akan berubah lagi. Gaya kepemimpinan seperti bukanlah suatu kelemahan. Seperti dikatakan oleh Frans Seda: "Dia punya intuisi tajam. Sering kita berpikir, secara logika, menganalisa fakta-fakta, menyodorkan bukti-bukti, tapi tetap saja belum pas. Di saat itulah Mega bertindak berdasarkan intuisinya, yang oleh orang-orang lain tidak terpikirkan sebelumnya." Cukup demokratis, tapi pribadi Megawati dinilai tertutup dan cepat emosional. Ia alergi pada kritik. Komunikasinya didominasi oleh keluhan dan uneg-uneg, nyaris tidak pernah menyentuh visi misi pemerintahannya.

Pada masa Megawati menjadi Presiden, dilakukanlah segala persiapan untuk menciptakan pemilihan Presiden secara langsung oleh seluruh rakyat Indonesia, tidak lagi melalui sidang umum MPR. Usaha ini berbuah manis ketika tahun 2004 Indonesia berhasil melaksanakan pemilihan Presiden pertama secara langsung dengan mekanisme voting oleh ratusan juta jiwa rakyat Indonesia. Alhasil megawati harus menerima kenyataan pahit bahwa sistem pemilihan yang berhasil beliau laksanakan pada masanya harus membuat dia kehilangan jabatan presiden pada periode berikutnya.

6. Susilo Bambang Yudhoyono

Susilo Bambang Yudhoyono pun mencatatkan dirinya dalam sejarah sebagai Presiden Pertama yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Orangnyanya mampu dan bisa menjadi presiden. Juga cukup bersih, kemajuan ekonomi dan stabilitas negara terlihat membaik. Sayangnya tidak mendapat dukungan yang kuat di Parlemen. Membuat beliau tidak leluasa mengambil keputusan karena harus mempertimbangkan dukungannya di parlemen. Apalagi untuk mengangkat kasus korupsi dari orang dengan back ground parpol besar, beliau kelihatannya kesulitan. Sayangnya sekali saat Indonesia punya orang yang tepat untuk memimpin, parlemennya dipenuhi oleh begundal-begundal oportunis yang haus uang sogokan.

Pembawaan SBY, karena dibesarkan dalam lingkungan tentara dan ia juga berlatar belakang tentara karir, tampak agak formal. Kaum ibu tertarik kepada SBY karena ia santun dalam setiap penampilan dan apik pula berbusana. Penampilan semacam ini meningkatkan citra SBY di mata masyarakat.

SBY sebagai pemimpin yang mampu mengambil keputusan kapanpun, di manapun, dan dalam kondisi apapun. Sangat jauh dari anggapan sementara kalangan yang menyebut SBY sebagai figur peragu, lambat, dan tidak "decisive" (tegas). Sosok yang demokratis, menghargai perbedaan pendapat, tetapi selalu defensif terhadap kritik.⁶² Hingga

⁶²*Ibid.*

akhirnya SBY kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Indonesia untuk menjadi pemimpin sekali lagi.

7. Joko Widodo

Setelah masa jawabat Susilo Bambang Yudoyono berakhir maka dilakukanlah pemilihan periode selanjutnya. Pemilihan presiden tahun 2014 masih tetap menggunakan threshold dengan besaran yang sama dengan pemilihan sebelumnya. Tidak ada kenaikan threshold akan tetapi terdapat pengurangan calon presiden menjadi 2 orang saja. Hal ini tentu lebih dikarenakan dinamika politik, bukan karena sistem yang memaksa untuk menjadi 2 orang saja. Terdapat pembaharuan dalam sistem keterpilihan presiden pada tahun 2014 ini, yaitu seorang calon tidak hanya harus mendapat 50%+1 suara, namun juga harus mendapat minimal 20% suara di 17 provinsi (20% di tiap – tiap provinsi tersebut). Meskipun syarat pertama dipenuhi tapi syarat kedua tidak, maka pemilihan putaran kedua terpaksa harus digelar. Akan tetapi dikarenakan hanya terdapat 2 calon Presiden maka dapat dipastikan bahwa pemilihan hanya akan berlangsung satu putaran saja.⁶³ Dan akhirnya Joko Widodo terpilih untuk menjadi pemimpin yang baru.

Jokowi dikenal akan gaya kepemimpinannya yang pragmatis dan membumi. Ia seringkali melakukan "blusukan" atau turun langsung ke lapangan untuk melihat langsung permasalahan yang ada dan mencari solusi yang tepat. "blusukan" juga dilakukan untuk menemui langsung

⁶³ Fajar Muhammad Rhydo, *Op. Cit.*

warga dan mendengar keluh kesah mereka. Gaya yang unik ini dijuluki The New York Times sebagai "demokrasi jalanan". Jokowi juga dianggap unik dari pemimpin lainnya karena tidak sungkan untuk bertanya langsung kepada warga dan mendekati mereka bila akan meluncurkan suatu program. Namun, gaya ini juga menuai kritik. Misalnya, ada yang menyatakan bahwa blusukan hanya menghabiskan waktu dan energi, sementara yang dibutuhkan adalah kebijakan langsung dan bukan sekadar interaksi. Ada juga yang menilai blusukan merupakan pencitraan belaka tanpa memberikan solusi. Selain blusukan, kepemimpinan Jokowi juga dikenal akan transparansinya. Misalnya, mengumumkan jumlah gaji bulanan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada umum. Ia juga memulai sejumlah program yang terkait dengan transparansi seperti online tax, e-budgeting, e-purchasing, dan cash management system.⁶⁴

Pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat yang telah digelar sebanyak 2 kali dengan dimenangkan oleh satu orang yang sama sebetulnya belum bisa dijadikan tolak ukur keberhasilan demokrasi one man one vote ini. Jika pada era-era sebelumnya rakyat Indonesia memilih Presiden melalui wakil-wakil rakyat di MPR, sudah jelas tidak memberikan efek yang baik bagi negara.

⁶⁴Syakdiah, "Presiden Republik Indonesia dan Gaya Kepemimpinannya", di akses dari: <http://fisipol.widyamataaram.ac.id/posts/-Populika-Vol-V-No-1/presiden-republik-indonesia-dan-gaya-kepemimpinannya.html>, pada tanggal 1 maret 2018 pukul 11:00.

BAB III

KONSEP KEPEMIMPINAN MENURUT ABDULLAH AD-DUMAIJI

A. Biografi Abdullah Ad-Dumaiji

Abdullah Ad-Dumaiji alias Abdullah bin Umar Ad-Dumaiji lahir di Riyadh pada tahun 1956. keluarga Ad-Dumaiji adalah keturunan dari Suleiman bin Saleh bin Fauzan-alias Baldmeji-anak Saleh bin Fayez bin Hamad bin Abdullah bin Mohammed bin Ali bin Hussein bin Ali bin email bin Musharraf dari Al-Musharraf Maadheed dari Alohbb dari Bani Tamim, yang sekarang berkediaman di Khurmah, Riyadh, Mekkah.⁶⁵

Abdulah bin Umar Ad-Dumaiji merupakan lulusan dari Universitas King Abdulaziz mekkah pada tahun 1978 yang pada saat itu menyelesaikan studinya di fakultas Syariah, lalu setelah itu beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas Umm Al-Qura hingga mendapatkan gelar Magister pada tahun 1982. Setelah itu beliau melanjutkan study selanjutnya di Universitas Umm Al-Qura dan setelah menyelesaikannya, beliau mendapatkan gelar PhD (Doctor of Philosophy) tepatnya pada tahun 1988.⁶⁶

Mengawali karir sebagai seorang demonstran pada tanggal 23 Agustus 1978 hingga menjadi seorang asisten dosen. Seiring perjalanan waktu tepatnya pada 19 Februari 1983 beliau akhirnya di angkat menjadi seorang dosen. Setelah sekian lama berselang beliau pun tergabung kedalam Asosiasi Profesor pada tahun 1998, hingga akhirnya pada tahun 2013 akhirnya dia menjadi seorang Profesor.

⁶⁵ Abdullah bin Umar Dumaiji, Di akses dari: <http://al-dumaiji.com/web/page.php?do=show&action=seerah>, pada tanggal 1 maret 2018 pukul 11:00.

⁶⁶ *Ibid.*

Abdullah Ad-Dumaiji juga merupakan seorang guru besar di fakultas Dakwah dan Ushuluddin, Universitas Ummul Qura, Mekkah. Yang mana beliau pernah menjadi seorang wakil dekan di fakultas tersebut.⁶⁷

B. Karya Abdullah Ad-Dumaiji

1. Al-Imamah al-Uzhma inda Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah (1987). Kitab yang aslinya setebal 718 ini ditulis oleh penulis sebagai tesis untuk meraih gelar magister di Universitas Ummul Qura. Bagi para aktivis Islam, juga pada umat umumnya, kitab ini sangat penting. Sebab, di samping memberikan wawasan ilmiah yang luas tentang konsep imamah, insyallah juga akan menambah keyakinan dan kemantapan dalam memperjuangkan tegaknya tatanan (sistem) Islam dalam kehidupan. Syaikh Abdullah Ad-Dumaiji mengatakan, “Tidak ada kemuliaan dan ketinggian derajat bagi umat Islam, kecuali dengan berhukum pada Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, serta berjuang menegakan Khilafah Islamiyah yang akan menjaga agama Islam dan mengembalikan kemuliaan dan kehormatan umat Islam.”

Latar belakang ditulisnya buku ini adalah keprihatinannya akan upaya-upaya jahat berupa tasywih (pencitraan-burukan) dan tadnis (pencemaran) terhadap konsep imamah dan khilafah yang telah ada sejak masa awal Islam. Ad-Dumaiji mengatakan bahwa kitabnya bertujuan untuk membersihkan konsep imamah dari segala macam debu dan kotoran

⁶⁷*Ibid.*

yang menempel sehingga konsep imamah menjadi jelas dan tetap aktual bagi siapa saja yang hendak mencari kebenarannya.

2. Tawakal

Buku Tawakal ini menjelaskan secara rinci makna Tawakkal kepada Allah yang sesungguhnya. Apabila kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita, niscaya akan membuahkan berbagai kebaikan bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat.

Namun dalam realita kehidupan, kita dapati kebanyakan manusia melupakan faktor tawakal. Mereka lebih cenderung menggantungkan hasil usaha mereka pada proses yang benar, sistem yang rapi dan hukum sebab akibat. Padahal yang mampu merealisasikan apapun yang mereka upayakan hanya Allah semata. Karena itu tawakkal berkaitan sangat erat dengan keimanan. Bahkan bertawakal kepada Allah adalah syarat sahnya keIslaman dan keimanan seseorang.

Kita tidak bisa terlepas dari ketergantungan kepada Allah walau sekejap mata pun. Jika kita mencoba bersandar kepada diri kita sendiri, maka kita telah meyerahkan diri kita kepada kelemahan, kekurangan, kekhilafan dan kesalahan. Dan jika kita bersandar kepada orang lain, maka kita telah mempercayakan diri kepada pihak yang sedikitpun tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan manfaat maupun mudharat.

Karenanya kita tidak punya pilihan kecuali menyerahkan diri kepada Dzat yang ditangan-Nya terdapat segala urusan dan kekuasaan.⁶⁸

Namun demikian bukan berarti kita meninggalkan ikhtiar atau sebab akibat, karena melakukan hal tersebut merupakan bagian dari kesempurnaan tawakkal. Akan tetapi kita juga tidak boleh sepenuhnya bersandar kepada sebab tersebut. Dengan demikian melakukan ikhtiar yang disyariatkan menunjukkan kesempurnaan dan kekuatan tawakkal, dan meninggalkannya menunjukkan kebodohan terhadap syariat Allah.

3. Percaya pada Tuhan dan Hubungannya dengan penyebab.
4. Manarat di Jalan Hedaya Syeikh d. Model Taqi al-Din.
5. Pendekatan Sunni dan Masyarakat dalam menangani perselisihan public.
6. Platform ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah dalam berurusan dengan fatwa umum.
7. Penerbit dar al-Hadi al-Nabawi –Mesir, Dar al-Fadilah –Riyadh Mencetak: Tahun Pertama: 1434 AH Halaman: 197.
8. Penjelasan Sahih al-Bukhari sampai akhir buku iman kepada rahmat Allah al-Nawawi 1429.
9. Posisi orientalialis dari seruan Sheikh Mohammed bin Abdul Wahab Islam.
10. Kecurigaan kaum modernis Islam tentang adopsi pemahaman leluhur yang benar dari teks-teks hukum.

⁶⁸ Di akses dari: https://m.bukalapak.com/p/hobi-koleksi/buku/agama-kepercayaan/b2p5yz-jual-tawakkal-dr-abdullah-ad-dumaiji?blca=SEUSC-TESTC&blpt=SEUSC-TESTC&gclid=CjwKCAiAlvnfBRA1EiwAVOEgfE0HFHMbSBJ6z87bLSNxf2WxkVXJwYEtBU RU6ZnCTyW_c964VWaSWBoC4bcQAvD_BwE, Pada tanggal 29 November 2019, pukul 06:00.

11. Nama Tuhan terbesar.
12. Asal-usul Sunni dan masyarakat dalam berurusan dengan teks hukum.
13. Pesan Nodal kepada Sheikh Abu Bakar bin Mohammed Aref Khuqurir belas kasihan Tuhan.
14. Memahami nenek moyang yang saleh dari teks-teks hukum (kebenaran, pentingnya ziarah).
15. Imam besar Sunni dan komunitas.⁶⁹

C. Pemikiran Abdullah Ad-Dumaiji Tentang Kepemimpinan

Istilah pemimpin dalam Islam ada beberapa bentuk, yaitu khalifah, imam atau imamah, imarah, wilayah, sultan, mulk, dan ri'asah. Setiap istilah ini mengandung arti pemimpin secara umum. Namun biasanya istilah yang sering digunakan dalam konteks pemimpin pemerintahan dan kenegaraan yaitu khalifah, imamah, dan imarah. Sementara itu Abdullah Ad-Dumaiji lebih sering menggunakan istilah imam atau imamah didalam pembahasan ini.

Ad-Dumaiji mengutarakan beberapa point penting mengenai masalah kepemimpinan seperti wajibnya mengangkat seorang imam/pemimpin, tujuan-tujuan imam, dan syarat-syarat penting seorang pemimpin. Di antaranya akan di jelaskan sebagai berikut.

1. Kewajiban mengangkat imam

Mayoritas kaum muslimin menyepakati kewajiban mengangkat seorang imam.⁷⁰ Ahlus Sunnah wal Jamaah pun berpendapat bahwa imamah wajib hukumnya, dan kaum muslimin harus memiliki seorang

⁶⁹ Di akses dari: <https://ar.Islamway.net>, pada tanggal 29 November 2019, pukul 06:00

⁷⁰ Abdullah Ad-Dumaiji, *Op. Cit.* h. 55.

imam yang menegakan siyar-siyar agama, memberikan keadilan kepada pihak-pihak yang di dzalimi dengan mengambil hak-hak tersebut dari pihak-pihak yang mendzolimi. Pandangan mereka tentang imamah ini didasarkan kepada dalil-dalil Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan kaidah-kaidah syar'i.⁷¹

Ad-Dumaiji berpendapat bahwa mengangkat seorang imam hukumnya wajib, karna dapat mencegah dari bahaya kekacauan, sebab ketika tidak ada pengangkatan seorang imam akan menimbulkan bahaya dan kekacauan yang hanya diketahui oleh Allah. Mencegah bahaya, menjaga lima kepentingan ; agama, jiwa, kehormatan, harta dan akal, merupakan kewajiban syar'I dan salah satu tujuan syariat. Semua itu tidak akan terlaksana tanpa mengangkat seorang imam dari kaum muslimin. Dengan demikian mengangkat seorang imam adalah wajib. Sebagaimana Allah swt berfirman Dalam QS. An-Nisa: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*⁷²

⁷¹ Ibid. h. 56.

⁷² Departemen Agama RI., *Op. Cit.* h. 87.

Riwayat Abu Sa'id Al-Khudri R.A., bahwa Rasulullah saw bersabda :

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَكُمْ.

Artinya : “Apabila ada tiga orang pergi safar, hendaklah mereka mengangkat seorang di antara mereka sebagai pemimpin”.⁷³

Selain itu dalil yang menunjukkan kewajiban mengangkat seorang Imammah yaitu ijma, terutama ijma' para sahabat untuk mengangkat seorang khalifah Nabi swt sepeninggalan beliau. Bahkan pengangkatan khalifah pada masa itu dilaksanakan sebelum pengurusan dan pemakaman jenazah Nabi saw.

Pada saat itu setelah mendengar berita wafatnya Nabi saw. Mereka para sahabat segera mengadakan pertemuan di Saqifah yang dihadiri oleh para tokoh Muhajirin dan Anshar. Mereka meninggalkan persoalan paling penting bagi mereka pada saat itu, yaitu mengurus dan mengantarkan jenazah Rasulullah saw mereka segera berdiskusi dan bermusyawarah membahas persoalan khilafah. Kendatipun pada mulanya mereka berselisih terkait siapa yang akan mereka baiat, mereka tetap menyepakati kewajiban adanya imam. Tidak ada seorang pun yang mengatakan “Kami tidak membutuhkan seorang imam”. Sedangkan para sahabat yang tidak hadirpun ikut menyetujui kesepakatan para peserta rapat sebelumnya.⁷⁴

⁷³ Abdullah Ad-Dumaiji, *Op. Cit.* h. 61.

⁷⁴ *Ibid.* h. 69.

Selain itu menurut Ad-Dumaiji dalil lainnya yang mengatakan tentang wajibnya imam yaitu kaidah syar'i yang menyatakan bahwa ketika suatu kewajiban tidak terlaksana tanpa sesuatu, maka sesuatu tersebut hukumnya wajib. Sudah maklum bahwa Allah swt telah memerintahkan banyak hal yang tidak akan mampu dilaksanakan oleh individu. Misalnya, menegakan hudud, mempersiapkan pasukan mujahidin untuk menyebarkan Islam, meninggikan kalimat Allah, menarik dan membagikan zakat kepada golongan-golongan yang telah ditentukan, menjaga tapal batas, menjaga wilayah kaum muslimin, menyebarkan keadilan, mencegah kezaliman, memutuskan pertikaian diantara manusia, dan kewajiban-kewajiban lainnya yang tidak dapat dilaksanakan oleh individu dari manusia. Semua kewajiban tersebut (agar terlaksana) mengharuskan adanya kekuasaan dan kekuatan yang berhak ditaati oleh setiap individu. Sebuah kekuasaan yang berwenang melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Dan kekuasaan tersebut adalah seorang penguasa atau imamah.⁷⁵

Ad-Dumaiji pun mengatakan wajibnya seorang imamah adalah untuk mencegah bahaya kekacauan, karena ketika tidak ada pengangkatan seorang imam akan menimbulkan bahaya dan kekacauan yang hanya diketahui oleh Allah. Mencegah bahaya, menjaga lima kepentingan yaitu agama, jiwa, kehormatan, harta, dan akal, merupakan

⁷⁵ *Ibid.* h. 71.

kewajiban syar'I dan salah satu tujuan syariat. Semua itu tidak akan terlaksana tanpa mengangkat seorang imam bagi kaum muslimin.⁷⁶

Wajibnya mengangkat seorang pemimpin merupakan perkara fitrah, dimana Allah menciptakan manusia sesuai dengan fitrah tersebut. Manusia adalah mahluk sosial/madani (beradab), maka jelas ia tidak dapat hidup sendirian, terpisah dari manusia lainnya. Bahkan ia harus hidup bersama dengan manusia yang lain agar persoalan-persoalan hidup dapat berjalan dengan baik dan segala kepentingannya dapat terlaksana. Dan dampak dari hidup berbaaur dengan sesama ialah terjadi benturan kepentingan dan menyebabkan gesekan antara satu sama lain sehingga menimbulkan pertikaian. Untuk itu diperlukanlah seorang pemimpin sebagai rujukan ketika terjadi perselisihan di antara sesama manusia.⁷⁷

2. Tujuan Imam.

Abdullah Ad-Dumaiji berpendapat bahwa pemimpin (imamah) dan kekuasaan didalam Islam hanya sebatas sarana, bukan tujuan. Sarana untuk meraih tujuan-tujuan tertentu. Dengan kemampuan istimewa yang dimilikinya, ia bisa mewujudkan dan menunaikan apa yang tidak bisa dilakukan oleh individu dari kaum muslimin. Adapun inti dari tujuan-tujuan imamah ialah menegakan perintah Allah swt di muka bumi sesuai dengan yang Dia syariatkan, amar makruf nahi munkar, memerintahkan segala kebajikan, mencegah segala kemungkaran, melenyapkan segala

⁷⁶ *Ibid.* h. 73.

⁷⁷ *Ibid.* h. 75.

kemungkaran, melenyapkan segala kerusakan, menghentikan kerusakan dan pelaku kerusakan.⁷⁸

Allah swt berfirman dalam Quran surat *al-Hajj:41* :

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا
عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَنِ الْأُمُورِ ۝

Artinya : (yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.⁷⁹

Tujuan dan sasaran-sasaran seorang pemimpin seperti yang Nampak jelas dalam definisi-definisi sebelumnya tercermin pada dua tujuan besarnya, yaitu : Iqamatudin; Menegakkan agama, dan Menata dunia dengan agama.

Berikut ini penjelasan tentang tujuan pengangkatan imam atau pemimpin :⁸⁰

a. *Iqamatudin*; Menegakan Agama

Adapun yang dimaksudkan agama disini adalah agama kebenaran, yaitu agama Islam. Inilah tujuan pertama dan yang paling utama. Tujuan seorang pemimpin adalah untuk menegakan agama. Maksudnya, menjadikan agama sebagai syiar nyata sebagai mana yang diperintahkan, seperti ikhlas dalam menjalankan ketaatan,

⁷⁸ *Ibid.* h. 89.

⁷⁹ Departemen Agama RI., *Op. Cit.* h. 337.

⁸⁰ Abdullah Ad-Dumaiji, *Op. Cit.* h. 90-106.

menghidupkan As-sunnah, dan mematikan bid'ah, agar seluruh hamba melaksanakan ketaatan kepada Allah.

Penegakan agama terwujud dalam dua hal (menjaga agama dan melaksanakannya).

1) Menjaga agama

Allah swt telah menjamin akan menjaga Al-Quran, seperti yang Dia firmankan dalam QS. al-Hijr ayat 9:

إِنَّا خُنُّ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴿٩﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan Sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya*”.⁸¹

Allah tidak melimpahkan penjagaan Al-Quran kepada kita seperti halnya umat-umat terdahulu yang dilimpahi tanggung jawab menjaga kitab masing-masing, sehingga akhirnya kitab-kitab tersebut mengalami perubahan. Hal ini seperti yang Allah singgung dalam firman-Nya dalam QS. al-Maidah :44:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ تَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَآخِشُوا اللَّهَ لَا تَشْتَرُوا بِغَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

⁸¹ Ayat Ini memberikan jaminan tentang kesucian dan kemurnian Al-Quran selamanya. Lihat Departemen Agama RI., *Op. Cit.* h. 262.

Artinya : *“Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir”*.⁸²

Untuk menjaga sunah nabawiyah, Allah swt menyiapkan ulama ahli dan kritikus. Para ulama tersebut menjaga (menghafal) sunah nabawiyah didalam dada mereka. Selain itu, mereka juga menuliskannya didalam kitab-kitab As-sunnah yang diriwayatkan lengkap dengan sanad-sanadnya. Mereka memilah antara hadis-hadis shahih, dhaif maupun maudhu'. Ini merupakan wujud penjagaan Allah untuk agama Islam. Dengan menjaga Al-Quran dan As-Sunnah, agama akan selalu terjaga dan kokoh sampai Allah mewarisi bumi dan siapapun yang ada di atasnya.⁸³

Maksud menjaga agama yaitu menjaga akidah Islam meresap di dalam dada siapa saja yang mengimaninya; menjaga tasawur (persepsi) kaum mukminin terhadap agama Islam secara murni, bersih dari segala campuran; mempertahankan seluruh hakikat dan maknanya seperti yang diturunkan Allah swt dan

⁸² *Ibid*, h. 115.

⁸³ Abdullah Ad-Dumaiji, *Op. Cit.* h. 91.

seperti yang telah disampaikan oleh Rasulullah saw serta yang dijalankan oleh para sahabat, yang mereka sampaikan kepada semua orang sepeninggalan beliau. Agama Islam yang mereka terapkan itu dalam kehidupan nyata. Mereka menetapkan keputusan kepada sesama berdasarkan hukum-hukum tersebut. Ia bukanlah agama yang hanya tertulis didalam kitab-kitab untuk dicari berkahnya dan dijadikan hiasan di majelis dan perkantoran.⁸⁴

2) Melaksanakan ajaran agama

Melaksanakan ajaran agama dapat ditempuh dengan melakukan beberapa perkara yaitu :

a) Menegakan syariat, hudud, dan memberlakukan hukum

Pelaksanaan hukum-hukum ini merupakan hak prerogatif pemimpin ataupun wakilnya, seperti hakim agama dan sebagainya. Sebab tidak setiap individu umat bisa melaksanakannya. Oleh sebab itu, pelaksanaan hukum-hukum Islam ini merupakan salah satu tujuan imamah yang dikhususkan bagi seorang imam.⁸⁵

Terdapat dua macam bentuk hukuman syar'i yang dimaksud : pertama, hukuman yang sudah ditentukan. Hukuman seperti ini disebut hudud, misalnya seperti had pencurian, hukuman cambuk bagi pemfitnah dan lain

⁸⁴ *Ibid*, h. 92.

⁸⁵ *Ibid*, h. 101.

sebagainya. Lalu yang kedua yaitu hukuman yang tidak ditentukan. Hukuman seperti ini disebut ta'zir. Hukuman jenis kedua ini mengacu pada ijtihad imam atau wakilnya dari kalangan hakim agama. Adapun cara dan ketentuan ta'zir ini berbeda-beda sesuai dengan besar-kesil kesalahannya, dan juga berdasarkan pada kondisi si pelaku kesalahan.⁸⁶

- b) Membawa kaum muslimin melaksanakan agama, baik dengan anjuran ataupun ancaman.

Di antara tujuan imamah terkait pelaksanaan agama adalah membawa umat untuk mengindahkan hudud Allah dan taat pada seluruh perintah-Nya. Mendorong mereka untuk itu dan menghukum para pelanggar dengan hukuman-hukuman syar'i. Sebab, ada sebagian orang yang hanya bisa diperbaiki dengan kekuatan, seperti halnya sebagian lainnya sudah bisa diperbaiki dengan kelembutan dan toleransi.⁸⁷

Salah satu sarana untuk menjaga dan melaksanakan agama adalah dengan melenyapkan factor-faktor penyebab kerusakan dan kemungkaran dari tengah-tengah masyarakat. Mustahil mengklaim menjaga agama dan memaksakan orang untuk melaksanakan ajaran agama dengan mengabaikan segala kerusakan dan kemungkaran tanpa

⁸⁶*Ibid*, h. 102.

⁸⁷*Ibid*, h. 104.

melenyapkan ataupun menjauhkan semua itu padahal ada kemampuan. Selain itu harus ditemph pula dengan mempermudah jalan-jalan kebaikan bagi masyarakat dan mendorong mereka untuk melakukan kebaikan sebisa mungkin.⁸⁸

b. Menata dunia dengan agama

Menurut Ad-Dumaiji, tujuan seorang imamah selanjutnya yaitu menata dunia dengan agama, atau menata kehidupan ini dengan hukum yang diturunkan Allah. Seperti penegakan hudud dan hukumannya. Penegakan hudud dan hukumannya merupakan bagian dari memutus perkara dengan hukuman yang diturunkan Allah, namun bukan satu-satunya, karena yang dimaksud dengan memutustuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Allah adalah menata dan mengatur seluruh persoalan hidup sesuai kaidah, prinsip, prinsip dan hukum-hukum syariat yang tertera secara nash atau disimpulkan dari nash-nash yang sesuai kaidah ijti had yang tepat.⁸⁹

Hudud adalah bagian dari memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Allah tidak sebatas menegakkan hudud saja, seperti yang dibayangkan banyak orang. Melalui sejumlah ayat dalam Al-Qur'an, Allah menjelaskan kaidah mendasar terkait konsep hukum dalam Islam. Allah swt berfirman :

⁸⁸ *Ibid*, h. 105.

⁸⁹ *Ibid*,

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ... ﴿٥٧﴾

Artinya : “ Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah”⁹⁰

Allah-lah yang berkuasa dan mengatur. Apapun yang ada di alami ini berada dibawah kendali dan aturan-Nya. Kekuasaan mutlak hanya milik Allah semata, bukan yang lain. Untuk itu, setiap muslim wawajib memahami kaidah ini dengan baik, dan menerapkannya dengan sebaik-baiknya. Sebab kaidah ini merupakan sebtansi agama Islam dan konsekuensi kalimat tauhid la ilaha illallah. Tiada iman tanpa mengimani hal ini. Para imam dan pemimpin tidak lain hanyalah lembaga-lembaga eksekutif yang menjalankan hukum-hukum Allah atas para hamba-Nya dan menata mereka dengan syariat-Nya. Tanpanya, kondisi umat manusia tidak akan menjadi baik.⁹¹

3. Metode pengangkatan imam.

a. Pemilihan

Imam tidak lain adalah wakil umat. Menurut pandangan Islam, imam tidak memiliki keistimewaan, kesucian, ataupun sifat-sifat tertentu yang membuatnya lebih tinggi dari kaum muslimin lainnya. Tanggung jawab pemilihan wakil umat sepenuhnya bergantung kepada umat sendiri, karena imam adalah wakil umat.⁹²

⁹⁰ Disebutkan dalam tiga ayat; surah Al-An'am ayat 57, surah Yusuf ayat 40, dan surah yusuf ayat 67.

⁹¹ Abdullah Ad-Dumaiji, *Op. Cit.* h. 106.

⁹² *Ibid.* h. 182.

Mengingat umat tersebar di berbagai wilayah dan perkotaan, ada orang kuat dan lemah, orang yang mengetahui maslahat umat dan tidak tahu, ada yang berakal dan ada pula yang tidak, ada yang mengikuti hawa nafsu, punya kepentingan, dan berbagai perbedaan lain yang menyulitkan untuk membedakan mana orang baik dan mana yang tidak, siapa yang berhak memikul amanat ini, dan berbagai pertimbangan lain, maka tanggung jawab pemilihan seorang imam berada dipundak orang-orang berakal, ulama, dan orang-orang mulia dari kalangan umat. Merekalah yang memilih siapa yang menurut mereka layak untuk menunaikan kewajiban syar'i yang Allah wajibkan kepada mereka; menegakkan syariat Allah di bumi, memerintahkan kebaikan, dan mencegah kemungkaran diseluruh belahan bumi.⁹³ Adapun yang dimaksud adalah kelompok Ahlul Halli wal 'Aqdi.

Abdullah Ad-Dumaiji mendefinisikan mereka sebagai sekelompok orang dengan tingkatan tertentu dalam agama, akhlak, pengetahuan akan kondisi masyarakat, dan memiliki kecakapan dalam mengatur segala persoalan.⁹⁴ Sedangkan para ahli fiqh siyasah merumuskan pengertian Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat atau warga negara. Dengan kata lain, Ahlul

⁹³ *Ibid.* h. 183.

⁹⁴ *Ibid.* h. 187.

Halli wal ‘Aqdi merupakan suatu lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.⁹⁵

Kelompok ini memikul tanggung jawab karena mereka memilih siapa yang akan disertai kepemimpinan dalam kapasitas mereka sebagai individu umat. Juga karena mereka sebagai wakil umat dan dipercaya umat untuk memilih siapa yang pantas untuk memegang jabatan besar ini. Juga karena mereka ikut menanggung dosa dihadapan Allah bersama pemimpin yang mereka pilih jika mereka tidak berusaha sekuat tenaga memilih pemimpin yang paling layak.⁹⁶

Karena mereka ini merasakan beratnya tanggung jawab memilih seorang pemimpin, kendatipun mereka adalah orang-orang terbaik, intelektual, dan ulama umat, tentu mereka akan memilih (calon imam) setelah melalui pertimbangan dan seleksi. Jauh dari keinginan hawa nafsu, ambisi pribadi, fanatisme golongan atau mazhab, dan Insya Allah (pilihannya) tepat.⁹⁷

Siapa saja yang menurut penilaian mereka layak memegang jabatan ini maka mereka akan membaiaatnya sesuai ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah. Ia wajib ditaati dalam segala hal selama bukan dalam kemaksiatan. Kelompok ini berwenang memilih seorang imam sebagai wakil umat secara keseluruhan. Dalam menentukan pilihan, mereka tidak hanya mewakili diri sendiri, tetapi juga mewakili umat secara keseluruhan. Untuk itu, ketika Ahlul Halli

⁹⁵ Muhammad Iqbal , *Op. Cit.* 158-159

⁹⁶ Abdullah Ad-Dumaiji, *Op. Cit.* h 183.

⁹⁷ *Ibid.* h. 184.

wal 'Aqdi membaiat seorang imam, si imam wajib dibaiat dan dipatuhi oleh seluruh individu umat.⁹⁸ Sementara itu mengenai jumlah banyaknya anggota dari kelompok ini, Ad-Dumaiji tidak menyinggungnya sedikitpun. Dikarnakan para ulama pun berbeda pendapat mengenai ketentuan jumlah tersebut.

b. Wasiat Istikhlaf.

Metode ini dilakukan melalui wasiat dari khalifah kepada seseorang yang ia pilih di antara kaum Muslimin untuk menggantikannya. Ketika seorang khalifah merasa ajalnya sudah dekat dan bermaksud hendak menunjuk seseorang sebagai pengganti untuk memimpin kaum muslimin, ia harus bermusyawarah dengan Ahlul Halli wal 'Aqdi terkait orang yang akan dia pilih. Apabila pandangannya tertuju kepada seseorang yang layak memegang jabatan ini dan disetujui oleh Ahlul Halli wal 'Aqdi, maka ia boleh mewasiatkan khilafah (pengganti khalifah) kepada orang yang ia pilih sepeninggalannya nanti.⁹⁹

4. Syarat-syarat imam.

Imam adalah pemimpin tertinggi Daulah Islamiyah. Sudah sewajarnya seorang imam harus memiliki sejumlah persyaratan tertentu yang wajib diperhatikan saat pemilihan. Hal ini mengingat jabatan yang

⁹⁸ *Ibid.* h. 187.

⁹⁹ *Ibid.* h. 215.

akan ia isi dan tanggung jawab besar yang akan ia emban, disamping agar ia cakap untuk memikul amanat besar ini.¹⁰⁰

Syarat-syarat ini ditetapkan oleh ulama bagi siapa saja yang akan ditunjuk untuk memimpin Daulah Islamiyah. Persyaratan ini harus diperhatikan dalam situasi dimana sifat (cara) pemilihan dapat terpenuhi bagi umat. Dalam situasi seperti ini, umat tidak boleh menyerahkan segala urusan kepada siapapun selain orang yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang dimaksud.

Sementara ketika tidak terpenuhi situasi pemilihan dan umat menghadapi situasi dimana mereka tidak bisa memilih imam yang ideal, seperti ditengah situasi perebutan kekuasaan secara paksa dan semacamnya, dimana kekuasaan dipegang oleh orang yang tidak layak dan tidak memenuhi persyaratan-persyaratan imamah, maka dalam situasi seperti ini seluruh persyaratan imamah tidak harus dipenuhi. Sebab, tuntutan untuk memenuhi semua persyaratan imamah akan memicu terjadinya banyak fitnah, dan umat tidak memerlukan hal semacam itu. Alasannya, maslahat kaum muslimin mengharuskan demikian, disamping juga berdasarkan kaidah “melakukan yang lebih ringan di antara dua bahaya”.

Oleh sebab itu, beberapa persyaratan imamah bisa ditangguhkan terlebih dahulu sampai situasi berubah dan waktu yang tepat tiba untuk mengangkat pemimpin yang memenuhi seluruh persyaratan imamah.

¹⁰⁰*Ibid.* h. 265-302.

Syarat-syarat imam ini beberapa diantaranya berlaku untuk seluruh kekuasaan Islam, baik itu bersekala besar ataupun kecil.

Menurut Ad-Dumaiji ada sebelas persyaratan yang harus terpenuhi oleh seorang imam, yaitu Islam, baligh, berakal, status merdeka, laki-laki, berilmu, adil, memiliki kecakapan diri, memiliki kecakapan fisik, tidak berambisi mendapatkan imamah, dan keturunan Quraisy. Diantaranya akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Islam

Syarat ini wajib dipenuhi dalam setiap kepemimpinan dalam Islam, baik bersekala kecil kecil ataupun besar, apalagi dalam ranah kepemimpinan tertinggi. Sebagaimana firman Allah swt QS. an-Nisa ayat 141:



Maksud dari ayat tersebut yaitu, (Allah tidak akan memberi jalan orang kafir) menguasai orang-orang mukmin didunia. Seperti yang kita ketahui bahwa kekuasaan tertinggi merupakan jalan terbesar dan terkuat untuk menguasai pihak lain.

¹⁰¹ Departemen Agama RI., *Op. Cit.* h. 101.

يَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim”. (al-Ma'idah: 51)¹⁰²

يَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أُرِيدُونَ أَنْ يُجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿١٤٤﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)”. (an-Nisa : 144)¹⁰³

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾

Artinya : “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan Hanya kepada Allah kembali (mu)”. (QS. Ali 'Imran: 28)¹⁰⁴

¹⁰² Ibid. h. 117.

¹⁰³ Ibid. h. 101.

¹⁰⁴ Ibid. h. 53.

Dan ayat-ayat lain yang melarang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Mengangkat mereka (selain Islam) termasuk dalam kategori larangan. Untuk itu, mengangkat orang kafir untuk menangani urusan kaum muslimin hukumnya tidak boleh.

b. Baligh

Persyaratan ini bersifat jelas dan pasti dalam setiap kepemimpinan Islam, baik bersekala kecil ataupun besar. Imamah tidak sah diberikan kepada anak kecil, karena semua urusannya berada dibawah walinya dan diwakili orang lain. Selain itu anak kecil bukan lah seorang mukalaf, jadi kita lebih dilarang untuk menyerahkan berbagai urusan kaum muslimin kepada anak-anak. Lalu anak kecil juga tidak punya kuasa untuk mengatur diri sendiri, maka secara syar'i ia tidak boleh mengatur urusan kaum muslimin. Karna orang yang tidak bisa mengatur dirinya sendiri tentu tidak bisa mengatur urusan kaum muslimin.¹⁰⁵

c. Berakal

Syarat ini juga termasuk persyaratan yang bersifat jelas dan pasti. Tidak sah, kepemimpinan orang yang hilang akal nya karna gila atau factor lain, karena akal merupakan alat berfikir. Ketika akal hilang, orang tidak bisa berfikir. Selain itu orang yang hilang akal memerlukan orang lain untuk mengurus dirinya, lantas bagaimana bagaimana urusan kaum muslimin diserahkan kepadanya. Jika anak-

¹⁰⁵ Abdullah Ad-Dumaiji, *Op. Cit.* h. 273.

anak tidak boleh memegang jabatan imamah ini karna alasan yang sama, berarti orang gila lebih tidak boleh memegang jabatan ini.¹⁰⁶

Seorang pemimpin daulah tidak cukup hanya berakal saja, tapi harus memiliki kecerdasan tingkat tinggi untuk memikirkan segala persoalan umat dan mencari solusi yang tepat.

d. Status Merdeka

Syarat ini pun termasuk salah satu syarat penting untuk seorang imamah, karna pada dasarnya seorang budak tidak berhak melakukan sesuatu tanpa seizin tuannya, sehingga ia pun tidak memiliki kuasa atas dirinya sendiri. Lantas, bagaimana mungkin ia berkuasa pada orang lain.¹⁰⁷

e. Laki-laki

Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini di antara para ulama. Dalinya adalah riwayat dalam shahih Al-Bukhari dan lainnya dari hadis Abu Bakar R.A., bahwa ketika Nabi saw mendengar orang Persia mengangkat putri Kisra sebagai ratu, beliau bersabda : *“Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita”*.¹⁰⁸

Di dalam Al-Quran ada banyak ayat yang menunjukkan pengutamaan kaum laki-laki atas wanita. Nabi saw mengabarkan bahwa wanita itu kurang akal dan agama, sementara imamah memerlukan kesempurnaan atas pandangan, akal, dan kecerdasan.

¹⁰⁶ Ibid. h. 274.

¹⁰⁷ Ibid. h. 275.

¹⁰⁸ Ibid. h. 279.

Kesaksian seorang wanita juga tidak diterima kecuali jika disertai seorang laki-laki.

Selain itu, memimpin kaum muslimin juga mengharuskan untuk ikut serta dalam berbagai pertemuan, berbaur dengan kaum laki-laki, memimpin pasukan, dan lain sebagainya. Semua kegiatan itu terlarang bagi wanita secara syar'i berdasarkan firman Allah swt. *"Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu"*¹⁰⁹. (Al-Ahzab: 33) dan ayat-ayat lainnya.

Berdasarkan pengalaman, orang tau bahwa imamah hanya patut dipegang oleh kaum laki-laki. Kalaupun ada wanita yang menduduki jabatan kepemimpinan negara, itu jarang terjadi dan hanya ditengah situasi-situasi tertentu. Selain itu, tabiat wanita secara psikis dan fisik sama sekali tidak cocok untuk memangku jabatan yang satu ini. Seperti yang diketahui, wanita mudah terpengaruh oleh perasaan dan emosi, juga penuh kasih. Sifat-sifat seperti ini diciptakan dalam diri wanita agar dapat menjalankan peran utamanya sebagai ibu dan tugas merawat anak.¹¹⁰

Sifat ini mungkin saja merugikan dalam lingkup kepemimpinan berbeda dengan laki-laki yang umumnya tidak lekas terpengaruh oleh perasaan seperti halnya wanita. Laki-laki lebih dominan

¹⁰⁹Departemen Agama RI., *Op. Cit.* h. 422.

¹¹⁰Abdullah Ad-Dumaiji, *Op. Cit.* h. 281.

memiliki daya nalar dan berfikir di mana keduanya merupakan penopang tanggung jawab dan kepemimpinan.¹¹¹

Oleh sebab itu, Allah mensyariatkan untuk kaum laki-laki sesuatu yang sesuai dengan bangun jasmani dan kejiwaannya, seperti jihad, kepemimpinan, dan semacamnya. Allah juga mensyariatkan kaum wanita sesuatu yang sesuai dengan kodratnya, seperti merawat anak dan pekerjaan-pekerjaan lain yang sesuai.

f. Berilmu

Seorang pemimpin haruslah memiliki ilmu syar'i dan ilmu-ilmu lainnya secara memadai, karena karakteristik tugas seorang imam mengharuskan seperti itu, dan bahkan dalam kondisi tertentu imam diharuskan menyampaikan pandangan ditengah situasi sulit yang tidak memungkinkan untuk mengumpulkan para ulama dan bertanya kepada mereka.

Hanya saja, imam tidak diharuskan mencapai tingkatan ahli ijtihad mutlak, karena syarat ini sulit dimiliki oleh sebagian besar orang pada zaman sekarang karena lemahnya minat untuk menuntut ilmu, sibuk dengan berbagai urusan dan kenikmatan dunia.

Syarat ini termasuk salah satu permasalahan ijtihad, Karena tidak ada nash tegas terkait hal ini. Rujukan permasalahan ini adalah kondisi mendesak, kebutuhan, dan maslahat. Ketika ada ahli ijtihad yang memiliki syarat-syarat penting imamah lainnya, maka orang

¹¹¹ *Ibid.* h. 286.

seperti inilah yang dicari. Namun jika tidak ada orang seperti ini, segala kepentingan kaum muslim bukan berarti diabaikan begitu saja dan segala kerusakan dibiarkan menyebar luas hanya karena tidak adanya ahli ijtihad yang memenuhi syarat-syarat seorang imam.¹¹²

g. *Adalah; Adil.*

Adil merupakan sifat terpendam di dalam jiwa yang mengharuskan seseorang untuk menjauhi dosa-dosa besar dan kecil dan menjaga diri dari sebagian perkara mubah yang (bila dilakukan) dapat merusak muru'ah, wibawa. Adil merupakan rangkaian dari sifat-sifat kesusilaan, seperti takwa, wara', jujur, amanat, adil, menjaga norma-norma sosial, dan menjaga apapun yang diwajibkan syariat untuk dijaga.¹¹³

Berdasarkan syariat ini maka tidak boleh mengangkat orang fasik menjadi pemimpin, ataupun orang yang memiliki kekurangan yang membuatnya tidak boleh memberikan kesaksian.

h. *Memiliki kecakapan psikologi.*

Sifat lainnya yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah berani menegakkan hudud, terjun dalam peperangan dan menguasai tentang peperangan, mampu memobilisasi rakyat untuk berperang, menguasai secara penuh beban politik dan mampu mengatur dengan

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid.* h. 287.

baik, sehingga ia mampu melindungi agama, berjihad memerangi musuh, menegakkan hukum, dan mengatur segala kepentingan.¹¹⁴

Ad-Dumaiji mengungkapkan bahwa tidak ada batasan pasti terkait syarat ini. Karna setiap zaman memiliki ukurannya sendiri. Yang terpenting ialah tidak ada kekurangan yang merusak tujuan-tujuan diangkatnya seorang imam.

i. Memiliki kecakapan fisik

Maksudnya panca indera dan seluruh anggota tubuh normal, dimana ketika ada salah satu indera kehilangan fungsinya akan berpengaruh kepada pikiran dan tindakan. Misalnya, tuna netra, tuna wicara, tuna rungu dapat mempengaruhi pikiran seseorang. Tuna daksa atau tidak memilikitangan dan atau kaki dapat memengaruhi ketangkasan gerak, mengurangi penampilan, dan mengurangi wibawa seorang pemimpin dimata rakyat.¹¹⁵

j. Tidak berambisi terhadap imamah

Nabi saw menyebutkan syarat ini secara nash. Beliau menganggap ambisi meraih imamah tanpa adanya kepentingan syar'i sebagai dakwaan yang pelakunya harus dihukum dengan sanksi dicegah untuk meraih imamah.

Sementara jika ada kepentingan syar'i ketika seseorang mengajukan diri sebagai imam, misalnya ia memiliki kelayakan untuk memegang jabatan tersebut, lalu imam yang ada saat itu

¹¹⁴ *Ibid.* h. 295.

¹¹⁵ *Ibid.* h. 297.

meninggal dunia dan tidak ditemukan adanya calon imam lain, di samping dikhawatirkan akan memicu kekacauan apabila pengangkatan imam baru ditunda, maka ia boleh mengajukan diri dengan niat untuk membenahi (keadaan). Bukan karena berambisi untuk mendapatkan jabatan tersebut.¹¹⁶

k. Keturunan Quraisy

Quraisy merupakan kabilah Arab terbaik berdasarkan nash hadis dari Nabi saw. Diriwayatkan dari Watsilah bin Asqa', ia berkata, "Rasulullah saw bersabda, 'sesungguhnya Allah memilih Kinanah di antara anak-anak Ismail, memilih Quraisy di antara anak-anak Kinanah, memiliki Quraisy di antara anak-anak Hasyim, dan memilihku di antara anak-anak Hasyim'".

Arab adalah suku bangsa, dan Quraisy berasal dari suku bangsa ini. Quraisy berpotensi memiliki kebaikan yang jauh lebih besar dari kebaikan yang ada pada selain kalangan mereka. Karena itu, mahluk Allah yang paling mulia, Nabi saw, berasal dari kalangan mereka. Beliau adalah sosok yang tiada bandingannya di antara siapapun dari kalangan Quraisy. Apalagi dari seluruh bangsa Arab dan non Arab.¹¹⁷

Al-Khulafa Ar-Rasydun berasal dari Quraisy dan sahabat-sahabat lainnya pun berasal dari Quraisy. Orang-orang yang lebih dulu masuk Islam berasal dari suku bangsa Arab. Mereka ini tidak

¹¹⁶ *Ibid.* h. 301.

¹¹⁷ *Ibid.* h. 331-332.

ada bandingannya di antara suku bangsa lainnya. Dengan demikian, diantara golongan terbaik pasti ada kelebihan yang tidak ditemukan pada golongan yang berada dibawahnya. Untuk itu, keberadaan orang-orang terbaik ditengah kaum Quraisy ditengarai lebih banyak daripada ditengah kaum lain.¹¹⁸

Mungkin inilah sebabnya mengapa kaum Quraisy diistimewakan memegang imamah, atau mungkin karena sebab lain. Ketidaktahuan kita akan hikmah ini sama sekali tidak menjadi penghalang hukum umum dan penerapannya, apalagi kalau bukan syarat nasab Quraisy bagi kaum imam.¹¹⁹

Seperti halnya syarat-syarat sebelumnya, syarat nasab imamah ini hanya berlaku pada saat pemilihan oleh Ahlu Halli wal 'aqdi. Sementara ketika pengangkatan seorang imam tanpa melalui jalur pemilihan, syarat nasab Quraisy tidak diberlakukan, seperti orang yang merebut imamah secara paksa dan dengan kekuatan misalnya, atau orang yang mendapat wasiat imamah dari imam sebelumnya dan dikhawatirkan memicu kekacauan jika imam seperti ini diturunkan.¹²⁰

Ad-Dumaiji mengatakan bahwa siapa yang lebih mampu merealisasikan tujuan-tujuan imamah dialah yang lebih berhak diangkat sebagai imam, baik ia orang terbaik ataupun bukan yang terbaik. Sebab jika ia saleh secara pribadi namun lemah dalam

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.* h. 333.

¹²⁰ *Ibid.*

manajemen maka kelemahannya akan berimbas pada umat secara keseluruhan. Semenara jika ia kuat dalam politik dan dapat mengatur segala persoalan dengan baik, namun ia memiliki sedikit kelalaian dalam ketaatan, maka dampak dari kelalaian tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi. Umat tidak ikut menanggngnya. Jadi, ia lebih utama untuk diangkat sebagai imam.¹²¹



¹²¹ *Ibid.* h. 370.

BAB IV

ANALISIS

A. Konsep Kepemimpinan Kepala Negara Menurut Ad-Dumaiji.

Islam datang membawa sistem pemerintahan yang sempurna. Hal ini menunjukkan kepada kita tentang kesempurnaan Islam dan relevansinya di setiap waktu dan tempat. Sebab, risalah Islam adalah risalah abadi yang telah ditetapkan hingga hari kiamat. Dan generasi terakhir dari umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan menerapkan apa yang membuat generasi awal umat ini menjadi baik. Seperti halnya mengenai masalah kepemimpinan.

Abdullah Ad-Dumaiji yang merupakan seorang ulama besar asal Mekkah ini berpendapat bahwa mengangkat seorang imamah (pemimpin) adalah wajib hukumnya berdasarkan Al-Quran, sunah, ijma', dan kaidah-kaidah syar'i. sedangkan imamah hukumnya wajib kifayah bagi Ahlul Halli wal 'Aqdi dalam kapasitasnya sebagai wakil umat dalam menjalankan tugas penting ini. Ketika Ahlul Halli wal 'Aqdi tidak melaksanakan kewajiban ini maka dosa ditanggung siapa saja yang mempunyai kemampuan untuk menjalankan kewajiban tersebut, sampai mereka berupaya menunaikan kewajiban ini semampu mungkin.¹²²

Imamah merupakan alat, bukan tujuan; alat untuk menegakkan umat yang berdiri di atas kebaikan dan keadilan, membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah; umat yang memerintahkan kebajikan, mencegah kemungkaran,

¹²²*Ibid.* h. 637.

beriman kepada Allah; dan umat yang menjalankan risalah samawi sesuai manhaj yang telah digariskan Allah.¹²³

Salah satu tujuan penting imamah adalah menjaga agama dan menata dunia dengan agama. Hal itu merupakan kewajiban paling utama yang dibebankan kepundak imam. Kafirlah orang yang memisahkan antara agama dan politik, dan menata dunia dengan selain agama Islam.¹²⁴

Adapun mengenai lembaga negaranya ya itu diwakili oleh Ahlul Halli wal ‘aqdi. Ahlul Halli wal Aqdi merupakan orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini biasanya dirumuskan untuk menyebut orang-orang pilihan yang berhak menyuarakan hati nurani umat sebagai wakil umat. Tidak disebutkan secara jelas mengenai jumlah dari anggotanya oleh maupun Abdullah Ad-Dumaiji.

Ad-Dumaiji juga mengatakan bahwa orang yang berhak memilih imamah adalah kalangan cerdik pandai dari umat dan ulama, atau disebut dengan Ahlul Halli wal ‘Aqdi. Kalangan awam ataupun rakyat jelata tidak perlu ikut campur dalam urusan ini. Oleh karena itu, orang berakal umumnya hanya akan memilih orang yang berakal dan paling layak untuk memegang jabatan penting seperti ini. Untuk itu, tidak diperlukan adanya kampanye, dan membuang-buang dana besar secara batin untuk meraup suara bagi calon pemimpin pengganti, seperti halnya yang berlaku dalam sistem demokrasi modern.¹²⁵

¹²³*Ibid.*

¹²⁴*Ibid.*

¹²⁵*Ibid.* h. 638.

Ad-dumaiji pun mengungkapkan bahwa tidak dipersyaratkan seorang imam haruslah orang terbaik di zamannya. Namun yang lebih utama ialah memilih orang yang paling layak dan bermanfaat bagi kaum muslim.¹²⁶

B. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan Kepala Negara Menurut Abdullah Ad-Dumaiji dan Relevansinya Dengan Negara Indonesia

Permasalahan pertama yang timbul pasca masa wafatnya rasulullah ialah mengenai masalah kepemimpinan, yang mana pada saat itu para sahabat sedikit menunda mengenai pengurusan jenazah Nabi. Mereka lebih mengutamakan siapa yang akan menggantikan kepemimpinan setelah nabi.¹²⁷ Jadi dengan begitu dapat di simpulkan bahwa kepemimpinan itu merupakan suatu hal yang sangat penting.

Antara pemikiran Ad-Dumaiji dengan fiqh siyasah terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan seperti halnya mengenai syarat menjadi seorang pemimpin. Dimana seorang pemimpin haruslah orang yang berilmu atau berpengetahuan luas, adil, sejahtera panca indranya. Sedangkan mengenai persyaratan bahwa pemimpin harus keturunan Quraisy, sebagian ulama mengatakan harus dan sebagiannya pun tidak.

Yang menarik mengenai pemikiran Abdullah Ad-Dumaiji yaitu beliau mengatakan bahwa tidak dipersyaratkan seorang pemimpin haruslah orang terbaik di zamannya. Namun, yang lebih utama ialah memilih orang yang paling layak dan paling bermanfaat bagi kaum muslimin. Artinya semua persyaratan tersebut

¹²⁶ *Ibid.* h. 639.

¹²⁷ Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyasah:Konsepsi Kekuasan Politik dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1995) h. 1.

tidak menjadi acuan jika ada orang yang paling layak dan bermanfaat untuk kaum muslimin.¹²⁸

Sementara itu Nabi saw tidak pernah meninggalkan wasiat atau pesan tentang tatacara atau siapa di antara para sahabat yang harus menggantikan dia sebagai pemimpin umat. Baik didalam Al-Quran maupun Hadis pun tidak terdapat bentuk tentang bagai mana cara menentukan pemimpin umat atau kepala negara sepeninggalan beliau nanti, selain petunjuk yang sifatnya sangat umum agar umat Islam mencari penyelesaian dalam masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama melalui musyawarah. Selain itu pula tidak ada pula pola yang baku mengenai bagaimana musyawarah itu harus diselenggarakan. Sehingga pada masa ditentukannya empat Al-Khulafa Ar-Rasyidin itu dilakukan melalui pola musyawarah yang ditempuh dengan beraneka ragam. Sehingga terdapat perbedaan-perbedaan pemikiran di antara para ulama mengenai sistem pemilihan tersebut.

Adapun mengenai lembaga negaranya ya itu diwakili oleh Ahlul Halli wal ‘aqdi. Ahlul Halli wal Aqdi merupakan orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini biasanya dirumuskan untuk menyebut orang-orang pilihan yang berhak menyuarakan hati nurani umat sebagai wakil umat. Tidak disebutkan secara jelas mengenai jumlah dari anggotanya baik oleh fiqh siyasah maupun Abdullah Ad-Dumaiji. Dalam hal ini pun para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah banyaknya anggota didalam lembaga tersebut.

¹²⁸ Abdullah Ad-Dumaiji, *Op. Cit.* h. 639.

Di Indonesia sendiri, syarat untuk calon pemimpin negara telah diatur dalam UU No 42 tahun 2008 ayat 5 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.
3. Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.
4. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
5. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.
7. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
8. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
9. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
10. Terdaftar sebagai Pemilih.
11. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

12. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
13. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
14. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
15. Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun.
16. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
17. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI.
18. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.¹²⁹

Itulah beberapa persyaratan calon kepala negara yang akan memimpin bangsa Indonesia. Yang mana jika kita kaji lebih dalam, maka akan ada titik temu antara pemikiran Ad-Dumaiji tentang kepemimpinan negara dengan kepemimpinan negara di Indonesia, yaitu mengenai syarat atau kriteria bagi seseorang yang akan menduduki jabatan kepala negara, yaitu adil, mampu, berilmu, sehat jasmani

¹²⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 Mengenai Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 5.

maupun rohani, dan keturunan Qurais (keluarga terhormat). Adapun kontekstualisasi dari syarat keturunan Quraisy menurut Ad-Dumaiji yaitu bahwa seorang pemimpin harus memiliki kelebihan di bandingkan dengan yang lainnya, seperti kewibawaan, mendapatkan kepercayaan dan legitimasi dari masyarakat. Yang mana apabila suatu pemerintahan yang tidak legitimate maka akan mendapatkan kendala dalam menjalankan tugasnya.

Jika syarat ini diterapkan di Indonesia, maka sangatlah tepat dan relevan, kendati harus dilakukan reaktualisasi dan rekontekstualisasi dalam konteks ke-Indonesia-an.

Dengan begitu maka terdapat kejelasan mengenai titik temu antara pemikiran Abdullah Ad-Dumaiji dan negara Indonesia yaitu mengenai masalah persyaratan dan kriteria bagi seseorang yang akan menduduki jabatan kepala negara dan mengenai penerapan nilai Islam yang tidak harus secara formal didalam suatu negara demi mencapai kesejahteraan dan kemakmuran.

Selain titik temu antara pemikiran Abdullah Ad-Dumaiji tentang kepemimpinan negara dan kepemimpinan negara Indonesia, ada titik pembeda atau tidak relevan dengan kepemimpinan negara di Indonesia, ya itu mengenai sistem pemilihan nya, dimana Abdullah Ad-Dumaiji mengatakan bahwa orang yang berhak memilih pemimpin yaitu hanya orang yang berintegritas tinggi atau orang-orang cerdas pandai dari kalangan ulama (Ahlul Halli wal' Aqdi) dengan mekanisme penunjukan langsung, sedangkan di Indonesia sendiri sistem penunjukan secara langsung terjadi pada masa kepemimpinan era orde lama, orde baru, dan masa awal reformasi tepatnya pada masa pengangkatan Megawati

setelah menggantikan Abdurahman wahid. Pada masa kepemimpinan Megawati, beliau mulai menerapkan sistem pemilihan presiden secara langsung yang dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia, yang mana tidak lagi melalui sidang umum MPR. Usaha ini berbuah manis ketika tahun 2004 Indonesia berhasil melaksanakan pemilihan Presiden pertama secara langsung dengan mekanisme voting oleh ratusan juta jiwa rakyat Indonesia. Lalu mekanisme pemilihan tersebut dilakukan terus menerus hingga saat ini yang dikenal dengan istilah Demokrasi.

Dengan demikian maka sangatlah jelas bahwa titik pembeda antara pemikiran Ad-Dumaiji tentang kepemimpinan negara dan kepemimpinan negara Indonesia yaitu mengenai sistem pemilihannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan, dan penelitian terhadap permasalahan terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep kepemimpinan negara menurut Abdullah Ad-Dumaiji mengacu pada aspek kemaslahatan dan kesejahteraan yang mana orang yang berhak menjadi kepala negara merupakan orang yang harus berintegritas tinggi, berilmu, adil, mampu, sehat badan baik secara jasmani maupun rohani. Di samping itu orang yang berhak memilihnya pun hanyalah dari kalangan cerdik pandai dari umat dan ulama, karna pada dasarnya orang yang berakal akan memilih orang yang berakal pula dan yang paling layak untuk memegang jabatan penting ini. Sehingga tidak diperlukan adanya kampanye.
2. Pemikiran Abdullah Ad-Dumaiji sejauh ini tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Hal ini dikarenakan pemikiran Abdullah Ad-Dumaiji didasarkan kepada Al-Quran dan Hadis. Adapun relevansi antara kepemimpinan negara Indonesia dan pemikiran Abdullah Ad-Dumaiji yaitu mengenai syarat atau kriteria calon yang akan menduduki jabatan pemimpin. Dan hal yang tidak relevansi antara pemikiran Abdullah Ad-Dumaiji dan negara Indonesia adalah mengenai tatacara penyelenggaraan dalam sistem pilihannya.

B. Saran

Mengingat negara Indonesia ini bermayoritaskan kaum muslimin, dan hukum di Indonesia ini bukanlah hukum Islam maka kepada para pengurus kepentingan negara agar memperhatikan pendapat dari seluruh umat agar menyeleksi setiap calon pemimpin pada masyarakat Islam. Selain itu menerapkan nilai-nilai ajaran Islam didalam suatu kepemimpinan merupakan suatu hal yang baik untuk dilakukan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Umar Dumaiji, "*Biografi*" (On-Line) tersedia <http://al-dumaiji.com/web/page.php?do=show&action=seerah>.
- Abdullah Ad-Dumaiji, *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*. Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Achmad Chodjim, *Membangun Surga*, cet ke-1. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Ali Ahmad As Salus, *Aqidah Al-Imamah, Inda as-Syari'ah al-Isna' Asyariyah* (terjemah) cet. Ke-1. Jakarta: Germa Insani Press, 1987.
- Amiruddin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Anoraga, Panji. *Psikologi Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Bernardine, Susilo Supardo, *Kepemimpinan*. Yogyakarta: Andi offset, 2005.
- Cholis Akbar, "*Enam Dalil Memilih Pemimpin dalam Islam*" (On-Line) tersedia di: <http://m.hidayatullah.com/none/read/2016/03/22/91574/fiqh-kepemimpinan.html>.
- Departemen Agama, *Ensiklopedia Islam 2*, CV. Jakarta : Anda Utama, 1993.
- Fajar Muhammad Rhydo, "*Pemilihan Presiden dari Masa ke Masa*" (On-Line) tersedia di: <https://www.kompasiana.com/bemfeui2014/54f7189ea33311190b8b491f/%20pemilihan-presiden-dari-masa-ke-masa>.
- H. Abu Daud Busroh, *Capita Selecta Hukum Tata negara*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Hasbullah Bakry, *Sistematika Filsafat*. Jakarta: Wijaya. 1978.
- Henny Sovya, "*Mengenal Gaya Kepemimpinan Presiden di Indonesia*" (On-Line) tersedia di: https://www.kompasiana.com/hennysovy/mengenal-gaya-kepemimpinan-presiden-di-indonesia_552c5c1c6ea834f7738b4571.
- Hisyam Yahya At Thalib. *Panduan Latihan Bagi Gerakan Islam*. Jakarta: Media Dakwah, 1999.
- Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.

Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992.

Kartini Kartono, *Pimpinan dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali, 1983.

Kompasiana, “Perbedaan Gaya Kepemimpinan Presiden dan Bagaimana Menyikapinya”, (On-Line) tersedia di:
http://www.kompasiana.com/banjirembun/salam-dua-jari-saya-muslim-menolak-kemunafikan_58958cd8af7e612007e0248c.

Lexy L Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. XIV. Bandung : Remaja Rosda Karya, 2001.

Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Muh. Nazir, *Metode Penelitian*. Jakarta :Ghalia Indonesia,th.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Ngalim Purwanto, dkk., *Administrasi pendidikan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Nugroho Dewanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung: Pt. Yrama Widya, 2004.

Pius A Partanto, M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 1994.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Ridwan Yahya, *Kepemimpinan Dalam Al-Quran*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Siti Patimah, *Manajemen Kepemimpinan Islam Aplikasinya dalam Organisasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Soerjono Soerkanto, *Sosiologi suatu pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Suharsini Arikunto, *Prosedur Peneltian Suatu Pendekatan Praktek* (Ed.) Cet. 4. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Sukarna, *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju, 1992.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.

Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*. Yogyakarta: Andi Offset, 1987.

Syaikh Mustafa Masyhur, *Fiqh Dakwah*, cet. 1. Jakarta: Cahaya Umat, 2000.

Syakdiah, "Presiden Republik Indonesia dan Gaya Kepemimpinannya", (On-Line) tersedia di: <http://fisipol.widyamataram.ac.id/posts/-Populika-Vol-V-No-1/presiden-republik-indonesia-dan-gaya-kepemimpinannya.html>.

Thoha, *Kepemimpinan dalam manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers, 1983.

Veitzai, Et.al., *Pemimpin dan kepemimpinan dalam Organisasi*. Jakarta: Raja Pers, 2013.

